

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 pasal 10 ayat (2), salah satu tugas pejabat pengelola keuangan daerah adalah menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Hal tersebut tentunya selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Republik Indonesia, 2003). Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan SAP, laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidaknya berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain mengacu pada SAP, sistem akuntansi pemerintahan juga berpedoman pada peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selaku entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama tahun 2021. Disamping untuk memenuhi tanggungjawab ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan merupakan cerminan kinerja organisasi selama Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini berupa sumber data dan informasi menyangkut Realisasi Anggaran Belanja Daerah baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal termasuk Anggaran Pembiayaan. serta laporan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- 8) Perda No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- 9) Penyesuaian Pemetaan sesuai Permendagri No.108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Berdasarkan Pergub Sulsel No.46 tahun 2021

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) Bab dengan Rincian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III : Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1.1. Pendapatan - LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Pendapatan – LO
 - 3.1.4. Beban
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas Dana
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

BAB IV : Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dan fisik dalam Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan antara anggran dengan realisasi yaitu :

I. Pendapatan

Pendapatan yang direncanakan sebesar **Rp2.482.980.000,00** dapat terealisasi sebesar **Rp2.290.619.800,00** atau **92.25%**.

II. Belanja

Belanja yang direncanakan sebesar **Rp1.125.710.089.060,00** dapat terealisasi sebesar **Rp1.045.300.404.343,00** atau **92,86%**.

Secara keseluruhan Capaian Kinerja keuangan dan fisik Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROV. SULSEL
TAHUN ANGGARAN 2021

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
	PENDAPATAN	2.482.980.000,00	2.290.619.800,00	192.360.200,00	92,25	100,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah	2.482.980.000,00	2.290.619.800,00	192.360.200,00	92,25	100,00
	Pendapatan Tahun 2021 pada umumnya belum mencapai target yang ditetapkan, kecuali penerimaan retribusi penyewaan tanah yang merupakan hasil sewa kantor kas bank sulselbar. Penerimaan retribusi pemakaian laboratorium (sewa Lab) dan retribusi pemakaian kendaraan bermotor (sewa alat berat) meskipun belum mencapai target namun meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Tahun 2021 terdapat piutang sewa tanah dan bangunan rumah dinas sebesar Rp22.840.000,00					
	BELANJA DAERAH	1.125.710.089.060,00	1.045.300.404.343,00	80.409.684.717,00	92,86	97,55
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.178.743.392,00	81.766.093.999,00	5.412.649.393,00	93,79	99,40
01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.280.730.260,00	1.457.778.312,00	822.951.948,00	63,92	95.86
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.03.01.1.01.01)	311.773.860,00	203.954.066,00	107.819.794,00	65,42	96,42
	Kurangnya penyerapan belanja bahan cetak (realisasi 26,97% dan bahan komputer (realisasi 0%) disebabkan belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memanfaatkan bahan yang ada secara maksimal. Sedangkan kurangnya belanja perjalanan dinas (realisasi 34,94%) disebabkan masih mewabahnya Covid 19 Sehingga kegiatan perjalanan dinas menjadi kurang maksimal					

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1.03.01.1.01.02)	287.591.600,00	173.396.560,00	114.195.040,00	60,29	96,24
	Berkenaan dengan masih mewabahnya COVID 19 sehingga perjalanan dinas SPPD Meeting dalam kota dan kegiatan makan dan minuman rapat tidak terserap anggarannya secara maksimal. Karena pertemuan lebih banyak dilakukan melalui Virtual Zoom Meeting.					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1.03.01.1.01.03)	51.996.500,00	44.705.000,00	7.291.500,00	85,98	100,00
	Berkenaan dengan masih mewabahnya COVID 19 sehingga perjalanan dinas SPPD Meeting dalam kota dan kegiatan makan dan minuman rapat tidak terserap anggarannya secara maksimal. Karena pertemuan lebih banyak dilakukan melalui Virtual Zoom Meeting.					
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (1.03.01.1.01.04)	196.426.800,00	115.236.200,00	81.190.600,00	58,67	100,00
	Belanja barang pakai habis sebagai penunjang kegiatan kantor disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2021 (efektivitas dan efisiensi). Belanja perjalanan dinas dalam kota belum terserap secara maksimal (realisasi 10,13%) dikarenakan kegiatan rapat/pertemuan lebih banyak dilakukan secara virtual					
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (1.03.01.1.01.05)	78.310.000,00	25.880.000,00	52.430.000,00	33,05	38,68
	Tidak ada realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan ini dikarenakan semula direncanakan untuk dilakukan <i>refocussing</i> anggaran namun tidak terlaksana. Kegiatan koordinasi penyusunan perubahan DPA tahun 2021 seluruhnya dilakukan secara online ataupun bersamaan dengan kegiatan lainnya					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1.03.01.1.01.06)	1.079.733.700,00	782.737.186,00	296.996.514,00	72,49	97,73
	Kurang maksimalnya penyerapan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terutama pada anggaran belanja makan minum rapat (41,45%), belanja lembur (47,26%) dan belanja perjalanan dinas dalam kota (0%), karena koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja sebagian besar dilakukan secara online (melalui transfer data) dan belanja lembur pegawai disesuaikan dengan kepentingan kegiatan terkait.					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.03.01.1.01.07)	274.897.800,00	111.869.300,00	163.028.500,00	40,69	100,00
	Belanja makan dan minum rapat tidak dapat terserap secara optimal (6,71%) karena tidak ada kegiatan rapat yang melibatkan pihak luar/rapat antar dinas. Hal ini sesuai dengan instruksi inspektorat pada bulan Agustus 2021 bahwa belanja makan minum rapat tidak dapat digunakan untuk kegiatan rapat intern.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp 1.457.778.312,00						
Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan - Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen RKA Perubahan - Jumlah Dokumen DPA - Jumlah Dokumen DPA Perubahan - Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja - Jumlah Laporan Evaluasi						
Hasil : - 1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen RKA Perangkat Daerah - 1.Dokumen RKA Perubahan - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Perubahan - 4 Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja - 1 Laporan Evaluasi						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.665.072.725,00	60.205.795.427,00	459.277.298,00	99,24	99,99
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.03.01.1.02.01)	59.624.067.525,00	59.305.127.426,00	318.940.099,00	99,47	100,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1.03.01.1.02.02)	167.589.000,00	166.627.000,00	962.000,00	99,43	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1.03.01.1.02.03)	22.182.700,00	22.182.700,00	0,00	100,00	100,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (1.03.01.1.02.04)	17.818.000,00	13.468.500,00	4.349.500,00	75,59	75,75
Secara keseluruhan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD telah terlaksana, namun belanja makanan dan minuman rapat tidak terealisasi (0%) karena adanya instruksi dari Inspektorat yang melarang untuk membebaskan konsumsi kegiatan rapat internal ke dalam belanja makan dan minum rapat						
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1.03.01.1.02.05)	20.233.000,00	14.174.000,00	6.059.000,00	70,05	100,00
Rekening belanja lembur pada sub kegiatan ini masih tersisa 45,2% dari anggaran yang ada dikarenakan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan pada sub bagian keuangan						
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (1.03.01.1.02.07)	794.438.400,00	667.851.701,00	126.586.699,00	84,07	99,92
Sisa anggaran sebesar 15,93% pada sub kegiatan ini sebagian besar berasal dari belanja barang pakai habis dan belanja perjalanan dinas dalam kota, yang merupakan sisa pemakaian atas anggaran belanja sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan.						
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1.03.01.1.02.08)	18.744.100,00	16.364.100,00	2.380.000,00	87,30	100,00
Sisa anggaran belanja cetak semula direncanakan akan difocussing ke kegiatan lain sehingga tidak dibelanjakan, sedangkan anggaran belanja makan dan minum rapat tidak dapat terealisasi karena tidak adanya kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pihak luar.						
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp60.205.795.427,00						
Keluaran : - Jumlah laporan penatausahaan keuangan 12 Dokumen - Jumlah laporan akuntansi Dinas 12 Laporan - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen - Jumlah Laporan Keuangan 12 Dokumen - Jumlah Laporan Prognosis 4 Laporan						
Hasil : - Laporan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran 12 Dokumen - Laporan SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan 12 Dokumen - Laporan akuntansi Dinas 12 Laporan - Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen - Laporan Keuangan 12 Dokumen - Laporan Prognosis 1 Laporan - Laporan Penjabaran 1 Laporan						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	343.424.600,00	255.031.400,00	88.393.200,00	74,26	99,16
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (1.03.01.1.03.04)	280.351.800,00	208.499.100,00	71.852.700,00	74,37	99,57
Pada sub kegiatan ini yang tidak terealisasi secara optimal adalah belanja cetak (11,15%), belanja makan dan minum rapat (16,72%) dan belanja perjalanan dinas dalam kota (0%), namun demikian kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ada pada bidang dan UPT. Tidak adanya undangan rapat secara resmi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut sehingga akibatnya tidak ada realisasi belanja perjalanan dinas dalam kota pada bidang dan UPT.						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (1.03.01.1.03.06)	63.072.800,00	46.532.300,00	16.540.500,00	73,78	97,35
	Capaian kinerja realisasi belanja pada sub kegiatan penatausahaan baran milik daerah sebesar 73,78% karena menyesuaikan dengan kebutuhan belanja Tahun Anggaran 2021					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp255.031.400,00						
Keluaran : Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset dinas 1 Laporan						
Hasil : 100 % terlaksananya Pengelolaan Asset (Laporan Neraca Aset 1 dokumen)						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	199.229.100,00	148.295.640,00	50.933.460,00	74,43	100,00
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (1.03.01.1.04.01)	16.410.500,00	4.930.000,00	11.480.500,00	30,04	100,00
	Kurangnya penyerapan pada sub kegiatan ini dikarenakan kurangnya kegiatan perjalanan dinas yang berkaitan dengan rencana pengelolaan retribusi daerah (sisa anggaran perjalanan dinas Rp11.385.000,00)					
2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (1.03.01.1.04.07)	182.818.600,00	143.365.640,00	39.452.960,00	78,42	100,00
	Realisasi keuangan yang kurang optimal pada belanja perjalanan dinas dalam daerah, dikarenakan kegiatan rapat/rekon bendahara penerima lebih banyak menggunakan kendaraan dinas sehingga tidak dipertanggungjawabkan.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp148.295.640,00						
Keluaran : Data Pengelolaan pendapatan Restribusi Daerah						
Hasil : Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp 2.287.562.800						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.676.900,00	82.251.500,00	21.425.400,00	79,33	84,56
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (1.03.01.1.05.03)	45.122.300,00	40.949.900,00	4.172.400,00	90,75	91,16
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (1.03.01.1.05.04)	10.044.300,00	6.075.300,00	3.969.000,00	60,49	61,67
	Realisasi keuangan sebesar 60,49% dikarenakan adanya belanja makan dan minum rapat yang tidak dapat terealisasi sesuai instruksi dari inspektorat bahwa belanja makan minum rapat dapat dipergunakan apabila kegiatan dilakukan dengan melibatkan tamu dari luar OPD					
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (1.03.01.1.05.05)	40.750.300,00	34.966.300,00	5.784.000,00	85,81	98,35
	Anggaran tidak terserap optimal pada rekening belanja makan dan minum rapat (realiasi 40% dari anggaran) karena mengikuti instruksi inspektorat					
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (1.03.01.1.05.09)	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	100,00
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (1.03.01.1.05.10)	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	Rencana kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak terlaksana karena anggaran yang diberikan tidak cukup (kurang) sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan					

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp82.251.500,00						
Keluaran : Rata – rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN						
Hasil : Nilai rata-rata perilaku pegawai sebesar 90%						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.384.555.165,00	1.476.507.068,00	908.048.097,00	61,92	91,70
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.03.01.1.06.01)	88.530.600,00	79.707.300,00	8.823.300,00	90,03	99,91
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.03.01.1.06.02)	477.271.570,00	475.569.570,00	1.702.000,00	99,64	100,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1.03.01.1.06.03)	215.460.480,00	111.408.680,00	104.051.800,00	51,71	62,38
Belanja modal alat kantor, alat rumah tangga dan alat kedokteran total sebesar Rp80.598.080,00 (59,76% dari anggaran) yang telah direncanakan tidak terealisasi dikarenakan semula akan dialihkan anggarannya untuk dana penanggulangan covid-19, namun sampai dengan akhir tahun belum dialihkan/tidak dipergunakan.						
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1.03.01.1.06.04)	104.025.750,00	72.451.600,00	31.574.150,00	69,65	84,19
Belanja pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor disesuaikan dengan kebutuhan logistik untuk tahun anggaran 2021						
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu (1.03.01.1.06.08)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Belanja Makan dan minum rapat pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu tidak dapat direalisasikan karena mengikuti instruksi inpektorat hanya jika ada tamu dari luar OPD.						
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.03.01.1.06.09)	1.396.207.165,00	734.986.618,00	661.220.547,00	52,64	99,81
Seluruh kegiatan yang direncanakan dalam sub kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Realisasi belanja sebesar 52,64% adalah total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Selanjutnya akan lebih ditingkatkan seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi Covid-19						
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1.03.01.1.06.10)	59.755.300,00	2.383.300,00	57.372.000,00	3,99	8,86
Rencana Belanja Modal Lemari dan arsip pejabat sebesar Rp53.610.000,00 (89,72% dari anggaran) tidak dilaksanakan dikarenakan aset yang ada masih layak untuk dipergunakan. Akan dianggarkan kembali pada saat dbutuhkan penggantian aset.						
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1.03.01.1.06.11)	32.504.300,00	0,00	32.504.300,00	0,00	0,00
Tidak ada kegiatan yang mendukung pelaksaaan kegiatan ini sehingga tidak ada realisasi anggaran pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp1.476.507.068,00						
Keluaran : Persentase pemenuhan Administrasi Umum						
Hasil : 100 % Terlaksananya Administrasi Umum						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.964.500 ,00	0,00	197.964.500,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Mebel (1.03.01.1.07.05)	188.204.500,00	0,00	188.204.500,00	0,00	0,00
	Belanja Modal alat kantor lainnya serta Belanja Modal meja dan kursi kerja pejabat tidak dilaksanakan dikarenakan spesifikasi barang yang direncanakan untuk dibeli tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia					
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.03.01.1.07.06)	9.760.000,00	0,00	9.760.000,00	0,00	0,00
	Rencana pengadaan Mesin Pemotong pohon (Sensor) sebanyak 2 unit senilai Rp3.500.000/unit dan pengadaan mesin potong rumput sebanyak 8 unit senilai Rp345.000/unit yang dianggarkan sebagai alat bantu untuk pekerjaan pemeliharaan pada UPT Dinas PUTR tidak dapat terealisasi karena keterbatasan waktu untuk pengajuannya.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp0,00 (tidak ada realisasi)						
Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah						
Hasil : -						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.282.526.742,00	15.587.865.815,00	1.694.660.927,00	90,19	99,96
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.03.01.1.08.02)	1.873.433.742,00	1.266.122.815,00	607.310.927,00	67,58	99,60
	Biaya pemakaian listrik, telpon dan air pada kantor dinas PUTR dan seluruh kantor UPT secara umum dibawah anggaran yang tersedia antara lain disebabkan : - Adanya tambahan anggaran biaya listrik untuk tambahan ruangan baru kantor UPT Wilayah IV tidak jadi dipergunakan karena rencana rehab gedung tidak terealisasi - Terdapat 2 gedung kantor di UPT Wilayah 2 di Kab. Enrekang yang sudah tidak bisa digunakan disebabkan Konstruksi Rangka Atap Kayu yang sudah Rapuh					
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.03.01.1.08.04)	15.409.093.000,00	14.321.743.000,00	1.087.350.000,00	92,94	100,00
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp15.587.865.815,00						
Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Hasil : 100 % Terlaksananya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.721.563.400,00	2.552.568.337,00	1.168.995.063,00	68,59	99,94
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.03.01.1.09.02)	2.907.971.400,00	1.946.787.264,00	961.184.136,00	66,95	100,00
	Belanja pembayaran pajak perizinan kendaraan terealisasi 52,80% karena kesulitan mencari BPKB kendaraan dan tidak ada laporan pengguna kendaraan untuk perpanjangan/pergantian no. kendaraan sedangkan belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor 43,76% menyesuaikan kebutuhan kondisi kendaraan					
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (1.03.01.1.09.03)	27.612.500,00	14.421.363,00	13.191.137,00	52,23	100,00
	Anggaran yang tidak terserap maksimal adalah belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan (43,31%)dikarenakan pada tahun ini semua masing-masing UPT telah menganggarkan biaya pembayaran pajak kendaraannya (STNK).					
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.03.01.1.09.06)	633.931.500,00	491.359.710,00	142.571.790,00	77,51	100,00
	Anggaran belanja pemeliharaan masih tersisa Rp100.439.150,00 merupakan sisa anggaran untuk tender pemeliharaan excavator amphi pada UPT Peralatan					
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (1.03.01.1.09.08)	152.048.000,00	100.000.000,00	52.048.000,00	65,77	98,65
	Rencana kegiatan pemeliharaan website tidak dilaksanakan karena anggaran yang ada tidak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sistem aplikasi/ website					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp2.552.568.337,00						
Keluaran : Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi baik						
Hasil : 100 % terlaksananya kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	190.143.543.573,00	170.480.792.689,00	19.662.750.884,00	89,66	96,31
01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.605.569.112,00	13.706.876.027,00	898.693.085,00	93,85	98,39
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai (1.03.02.1.01.03)	3.432.789.360,00	2.980.453.671,00	452.335.689,00	86,82	99,53
	Kurang optimalnya penyerapan pada sub kegiatan ini disebabkan: 1) Terdapat paket kegiatan Supervisi yang tidak jalan karena fisiknya tidak berjalan 2) Mengalami refocussing pada anggaran perjalanan dinas dalam daerah					
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (1.03.02.1.01.06)	963.209.961,00	961.363.061,00	1.846.900,00	99,81	99,97
3	Pembangunan Tanggul Sungai (1.03.02.1.01.09)	19.341.500,00	1.481.500,00	17.860.000,00	7,66	7,66
	Pekerjaan tdk terkontrak krn adanya refocusing pada pekerjaan fisik sehingga perjalanan dinas dalam rangka survey dan monitoring tdk terlaksana					

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
4	Rehabilitasi Tanggul Sungai (1.03.02.1.01.24)	1.638.554.233,00	1.638.554.233,00	0,00	100,00	100,00
5	Normalisasi/Restorasi Sungai (1.03.02.1.01.46)	7.893.234.958,00	7.584.309.312,00	308.925.646,00	96,09	97,47
6	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (1.03.02.1.01.49)	14.892.500,00	14.085.000,00	807.500,00	94,58	100,00
7	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (1.03.02.1.01.60)	252.822.000,00	249.936.200,00	2.885.800,00	98,86	100,00
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (1.03.02.1.01.61)	81.447.600,00	48.042.300,00	33.405.300,00	58,99	100,00
	Kurangnya pemahaman P3A (Petani Pemakai Air) tentang pentingnya pelatihan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga peserta yg hadir pd saat pelatihan kurang (sedikit)					
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (1.03.02.1.01.63)	172.155.000,00	105.415.000,00	66.740.000,00	61,23	100,00
	- Belanja Jasa Narasumber berasal dari Dinas terkait yakni DINAS PUTR hanya bisa terbayar 50% dari nilai jasa narasumber - Pada saat kegiatan sidang Pleno untuk peruntukan jasa moderator terdapat 3 orang (sesuai DPA) tetapi pada saat pelaksanaan sidang pleno komisi irigasi hanya 1 orang, - Perjalanan dinas dibatasi karena masih pandemi covid-19					
10	Operasi dan Pemeliharaan Danau (1.03.02.1.01.64)	7.333.000,00	6.928.000,00	405.000,00	94,48	100,00
11	Operasi dan Pemeliharaan Sungai (1.03.02.1.01.65)	129.789.000,00	116.307.750,00	13.481.250,00	89,61	99,61
	Belanja makan minum rapat yang dianggarkan sebesar Rp520.000,00 tidak terealisasi karena tiidak ada kegiatan rapat yang melibatkan pihak luar, serta perjalanan dinas yang masih tersisa anggarannya sebesar 10,29% dari anggaran karena keterbatasan waktu untuk melakukan perjalanan dinas.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp13.706.876.027,00						
Keluaran : Jumlah lokasi sungai / Danau/Waduk/Embung yang di tangani dan Pos Curah Hujan yang di tangani						
Hasil : Rehabilitasi Talud Sungai sepanjang 62 M, Pembangunan 1 (satu) Embung dan Pembangunan Pos Curah Hujan di 10 (sepuluh) titik lokasi						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Kab.Pangkajene Kepulauan dan Kab.Bone,Kab.Gowa, Kab Takalar, Kab.Jeneponto, Kab.Sinjai						
02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.537.974.461,00	156.773.916.662,00	18.764.057.799,00	89,31	96,14
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (1.03.02.1.02.01)	8.681.684.599,00	7.163.585.392,00	1.518.099.207,00	82,51	87,97
	Kegiatan Supervisi tidak dapat dilaksanakan karena fisiknya tidak berkontrak; pada Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air yaitu Paket Supervisi Pembangunan Embung Pallae Tahap II (1 Paket), Paket Supervisi Normalisasi Sungai Suli Kab. Luwu Cs (1 Paket), Paket Supervisi Pembangunan Talud Sungai Kanawayya Cs (1 Paket) dan Paket Supervisi Normalisasi Sungai Katteong Pinrang Cs (1 Paket)					
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (1.03.02.1.02.14)	163.095.784.272,00	146.070.275.566,00	17.025.508.706,00	89,56	96,53
	Kurang optimalnya belanja Hibah IPDMIP karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu: Belanja Bahan Bangunan berupa pembelian cat besi senilai Rp850.000. Selain itu Honor Narasumber kegiatan Sosialisasi Perda tentang Irigasi dan Perda tentang Pemberdayaan P3A sebesar Rp201.600.000,00 tidak terealisasi karena kegiatan sosialisasi tidak terlaksana.					

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak (1.03.02.1.02.17)	11.940.000,00	9.835.000,00	2.105.000,00	82,37	100,00
	Pekerjaan fisik dihapus akibat refocusing anggaran, sehingga tidak ada dasar dan tujuan untuk melakukan Perjalanan dinas.					
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (1.03.02.1.02.21)	3.282.367.090,00	3.144.948.954,00	137.418.136,00	95,81	98,51
5	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (1.03.02.1.02.22)	193.191.500,00	170.761.250,00	22.430.250,00	88,39	99,11
	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut.					
6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (1.03.02.1.02.24)	29.782.000,00	8.757.000,00	21.025.000,00	29,40	35,46
	1. Belanja ATK Tersisa Rp. 531.000,00,- Dikarenakan Tidak Sesuai Harga Ada Di DPA Dengan di Lapangan yang Ditemukan Oleh Inspektorat 2. Belanja Makan Dan Minum Tersisa Rp. 1.720.000,00,- Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Aturan Yang Mengsyaratkan Bahwa Peserta Rapat Tidak Boleh Hanya Lingkup UPT saja Tetapi Harus Ada Lembaga Atau Dinas lainnya Yang Terkait. 3. Belanja Modal Tersisa Rp. 17.500.000- Dikarenakan karena keterlambatan dalam pengajuan SPJ					
7	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi (1.03.02.1.02.28)	243.225.000,00	205.753.500,00	37.471.500,00	84,59	100,00
	Pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigas terkendala pada kurangnya Sumber Daya Manusia, serta tenaga yang ada saat ini (PPA dan POB) masih terbatas pemahamannya tentang air sehingga perlu diadakan pelatihan.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp156.773.916.662,00						
Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi yang di rehabilitasi dan di tingkatkan						
Hasil : Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi 71.544,04m dan Panjang Jaringan irigasi yang di bangun 15.279m						
Sumber Dana : APBD DAN LOAN (IPDMIP)						
Lokasi : Kab.Gowa, Kab.Sidrap, Kab.Luwu, Kab.Bone (DAK/ (APBD) Kab.Pinrang, (LOAN / (IPDMIP)						
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	115.527.100,00	102.723.200,00	12.803.900,00	88,92	100,00
01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	115.527.100,00	102.723.200,00	12.803.900,00	88,92	100,00
1	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi (1.03.03.1.01.08)	115.527.100,00	102.723.200,00	12.803.900,00	88,92	100,00
	Adanya kekhawatiran dana tidak tercukupi karena rencana reconfusing anggaran sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan di awal tahun, sehingga sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena keterbatasan waktu di akhir tahun.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp102.723.200,00						
Keluaran : Persentase ketersediaan bimbingan teknis SPAM Lintas Kab/Kota						
Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis yg capaiannya mencakup pembinaan ke 24 Kabupaten/Kota						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	102.805.500,00	97.467.000,00	5.338.500,00	94,81	100,00
01	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	102.805.500,00	97.467.000,00	5.338.500,00	94,81	100,00
1	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (1.03.04.1.01.08)	102.805.500,00	97.467.000,00	5.338.500,00	94,81	100,00
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp97.467.000,00						
Keluaran : Persentase ketersediaan Bimbingan Teknis persampahan Regional						
Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis yg capaiannya mencakup pembinaan ke 24 Kabupaten/Kota						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan						
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	106.541.500,00	78.161.000,00	28.380.500,00	73,36	100,00
01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	106.541.500,00	78.161.000,00	28.380.500,00	73,36	100,00
1	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (1.03.05.1.01.07)	106.541.500,00	78.161.000,00	28.380.500,00	73,36	100,00
	- Indikator pada level impact dan outcome umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan outcome kadang sulit terjadi. - Belum optimalnya data yang dihasilkan - Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp78.161.000,00						
Keluaran : Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik 4 Kab/Kota						
Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis yg capaiannya mencakup pembinaan ke 24 Kabupaten/Kota						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Semua Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota						
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	113.003.354.905,00	106.792.390.587,00	6.210.964.318,00	94,50	94,97
01	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	113.003.354.905,00	106.792.390.587,00	6.210.964.318,00	94,50	94,97
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (1.03.08.1.01.01)	112.714.140.105,00	106.740.606.887,00	5.973.533.218,00	94,70	94,97
2	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (1.03.08.1.01.04)	287.992.800,00	50.636.700,00	237.356.100,00	17,58	98,75
	Belanja perjalanan dinas semula direncanakan untuk difocussing sehingga sisa anggaran yang ada tidak digunakan, namun hingga akhir tahun 2021 rencana tersebut tidak terlaksana					

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
3	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara (1.03.08.1.01.09)	1.222.000,00	1.147.000,00	75.000,00	93,86	100,00
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp106.792.390.587,00						
Keluaran : - Jumlah lokasi bangunan gedung yang di kelola - Persentase ketersediaan layanan teknis bangunan gedung - Persentase pengujian paker pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan						
Hasil : - Terlaksananya penataan bangunan di 6 lokasi yang terletak di 4 Kabupaten (Bone, Maros,Tana Toraja , Jeneponto) dan 1 Kota Makassar - 100 % Ketersediaan layanan teknis bangunan gedung - 100 % Pengujian paker pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Kab/ Bone, Maros,Tana Toraja , Jeneponto dan 1 Kota Makassar						
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	31.611.896.607,00	28.276.454.655,00	3.335.441.952,00	89,45	93,19
01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	31.611.896.607,00	28.276.454.655,00	3.335.441.952,00	89,45	93,19
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (1.03.09.1.01.01)	4.095.092.940,00	3.515.905.242,00	579.187.698,00	85,86	96,95
	Pada Bidang Bina Teknik terdapat 5 paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang mengalami refocusing anggaran karena adanya kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu terdapat 1 paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang biayanya diubah menjadi dana hibah					
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (1.03.09.1.01.02)	5.641.887.027,00	4.447.251.003,00	1.194.636.024,00	78,83	90,50
	Terjadi refocusing anggaran terhadap 6 paket pekerjaan supervisi pembangunan gedung kantor dan 1 paket pekerjaan supervisi pembangunan rest area. Selain itu terdapat 2 paket pekerjaan yang tidak terealisasi karena direncanakan untuk dialihkan anggarannya menjadi dana hibah, yaitu Pengawasan Teknis Makomen Brimob dan Pengawasan Teknis Mess Anoa					
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan (1.03.09.1.01.03)	21.746.735.540,00	20.228.653.110,00	1.518.082.430,00	93,02	93,14
	Terjadi refocusing anggaran 5 Paket pekerjaan fisik, sehingga kegiatan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi progress pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Paket tersebut adalah Pembangunan/ Penataan Kawasan Wisata Potok Tengan, Belanja Modal Tanah Persil, Pembangunan Rest Area Malino, Penataan Kawasan Strategis puncak, dan Pembangunan Sumur Bor Kawasan Strategis Puncak					
4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (1.03.09.1.01.07)	128.181.100,00	84.645.300,00	43.535.800,00	66,04	100,00
	Adanya recofussing anggaran sehingga beberapa paket kegiatan fisik yang dihapuskan mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan monitoring di beberapa kabupaten kota.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp28.276.454.655,00						
Keluaran : - Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan - Jumlah dokumen perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan - Persentase pengujian paket pekerjaan penataan bangunan dan lingkungan yang di laksanakan						
Hasil : - Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan di 3 lokasi di kota Makassar - 13 Dokumen perencanaan Teknis penataan Bangunan dan Lingkungannya - 100 % Pengujian paket pekerjaan penataan bangunan dan lingkungannya						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	690.106.475.266,00	644.681.699.184,00	45.424.776.082,00	93,42	98,23
01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	690.106.475.266,00	644.681.699.184,00	45.424.776.082,00	93,42	98,23
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (1.03.10.1.01.01)	16.901.280.895,00	16.628.740.380,00	272.540.515,00	98,39	99,41
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (1.03.10.1.01.02)	520.000.955,00	178.106.632,00	341.894.323,00	34,25	100,00
Berkas kepemilikan tanah tidak lengkap sehingga tidak dapat dilaksanakan.Selanjutnya proses pembebasan tanah dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pemda Kab./Kota						
3	Pengelolaan Leger Jalan (1.03.10.1.01.03)	43.737.500,00	0,00	43.737.500,00	0,00	0,00
Kegiatan tidak terlaksana karena sebagian dari anggaran masuk dalam refocusing anggaran dan kegiatan ini tidak mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2021						
4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan (1.03.10.1.01.04)	604.881.800,00	428.898.440,00	175.983.360,00	70,91	100,00
Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak terserap 100 % karena waktu yang tidak mencukupi., namun demikian secara keseluruhan telah dilaksanakan (realisasi fisik 100%). Disamping itu juga masih mewabahnya Covid 19 Serta Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas dimana SPPD Dalam Daerah Dipakai sesuai Kebutuhan di Lapangan.						
5	Pembangunan Jalan (1.03.10.1.01.05)	364.709.789.849,00	342.830.092.793,00	21.879.697.056,00	94,00	100,00
6	Pelebaran Jalan Menuju Standar (1.03.10.1.01.06)	94.975.884.787,00	94.825.689.433,00	150.195.354,00	99,84	100,00
7	Rehabilitasi Jalan (1.03.10.1.01.09)	138.307.006.968,00	133.337.994.064,00	4.969.012.904,00	96,41	97,83
8	Pemeliharaan Rutin Jalan (1.03.10.1.01.11)	15.563.824.818,00	13.767.929.496,00	1.795.895.322,00	88,46	98,24
Belanja Pemeliharaan tidak terealisasi secara optimal dikarenakan cuaca yang tidak menentu serta tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan serta mengakibatkan bahan material yang akan digunakan terlambat tiba di lokasi pekerjaan.						
9	Pembangunan Jembatan (1.03.10.1.01.12)	25.268.119.115,00	15.195.353.892,00	10.072.765.223,00	60,14	67,61
Adanya kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: 1. Beberapa lokasi / medan pekerjaan yang berat. 2. Sering terjadi longsor pada beberapa titik pekerjaan						
10	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (1.03.10.1.01.21)	6.479.162.000,00	5.246.873.640,00	1.232.288.360,00	80,98	100,00
Dana yang tidak terserap adalah sisa tender pengadaan aspal pemeliharaan rutin.						
11	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (1.03.10.1.01.22)	1.144.936.972,00	954.690.345,00	190.246.627,00	83,34	99,54
Kegiatan pemantauan evaluasi untuk Bidang Bina Marga (DPA Bidang Bina Marga Rp. 624.938.972 dengan realisasi 72,42 % disebabkan krn belanja perjalanan dinas luar yang tidak terealisasi).						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
12	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (1.03.10.1.01.23)	25.587.849.607,00	21.287.330.069,00	4.300.519.538,00	83,19	97,69
	- Rasionalisasi pembayaran kontrak konsultan berdasarkan prestasi kerja (kehadiran personil) - Adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena nilai pagu dan waktu yang tidak cukup yaitu Paket Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Palampang - Munte - Botolempangan 1 1 Paket (SUMBER DANA PEN) 1 Paket dan Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Sabbang - Tallang 1 di Kab. Luwu Utara 1 Paket (SUMBER DANA PEN) 1 Paket					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp644.681.699.184,00						
Keluaran : Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK (Surat Keputusan) kewenangan provinsi						
Hasil : - Penanganan jalan 7.81 Km - Preservasi jalan 65.40 Km, - Pemeliharaan Rutin 1.588, 28 Km - Penanganan Jembatan 537.00 M						
Sumber Dana : APBD dan Loan PHJD						
Lokasi : Kab.Sidrap, Soppeng,luwu,Gowa Selayar, Tana toraja, Wajo,Sinjai,Jeneponto,Bone (APBD) dan PHJD Tana Toraja dan Toraja Utara						
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	880.355.900,00	689.244.392,00	191.111.508,00	78,29	95,58
01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	494.597.300,00	342.771.580,00	151.825.720,00	69,30	92,14
1	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (1.03.11.1.01.03)	122.367.900,00	24.477.900,00	97.890.000,00	20,00	69,11
	1. Keputusan Gubernur No. 342/III/tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari ASN lingkup internal Dinas PUTR Prov. Sulsel, sehingga tidak dapat dibayarkan honorinya (harus melibatkan unsur ASN external atau ASN dari luar dinas PUTR), akan tetapi output kegiatan Penyusunan SOP telah terpenuhi sesuai target TA. 2021. 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, realisasinya sangat rendah dikarenakan kurangnta undangan rapat / ssosialisasi perndang-undangan 3. Biaya makan minum tersisa anggarannya karena ada beberapa rapat tidak ada unsur ASN luar dinas yang diundang dan tidak sempat hadir, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.					
2	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (1.03.11.1.01.04)	372.229.400,00	318.293.680,00	53.935.720,00	85,51	99,70
	Kegiatan BIMTEK Tenaga Ahli Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA telah terlaksana. Sisa anggaran sebesar 14,49% dari anggaran karena jumlah honor narasumber yang dibayarkan sebesar Rp1.100.000,00/orang dibawah standar anggaran DPA.					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp342.771.580,00						
Keluaran : Jumlah pelatihan tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Provinsi yang menghasilkan tenaga ahli konstruksi yang terlatih						
Hasil : Terselenggaranya 3 jenis Pelatihan yang diikuti oleh 150 orang, masing-masing 50 orang peserta tiap pelatihan dengan pemberian Sertifikat.						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	122.070.000,00	98.720.000,00	23.350.000,00	80,87	100,00
1	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (1.03.11.1.02.03)	122.070.000,00	98.720.000,00	23.350.000,00	80,87	100,00
Kegiatan BIMTEK WORKSHOP SIPJAKI yang direncanakan 3 hari cukup dilakukan 2 hari saja karena output kegiatan telah terpenuhi.						
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp98.720.000,00						
Keluaran : Cakupan Terselenggaranya system informasi, Pembina jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan Provinsi yang aktif dengan data termutakhir.						
Hasil : Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan provinsi tercapai 100%						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
03	Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	263.688.600,00	247.752.812,00	15.935.788,00	93,96	100,00
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi (1.03.11.1.03.02)	263.688.600,00	247.752.812,00	15.935.788,00	93,96	100,00
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp247.752.812,00						
Keluaran : Peningkatan persentase penyedia jasa konstruksi yang berkinerja baik						
Hasil : Terwujudnya Keselamatan Kerja Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebesar 70%						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	12.460.845.317,00	12.335.853.137,00	124.992.180,00	99,00	99,86
01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	7.294.595.292,00	7.264.095.909,00	30.499.383,00	99,58	100,00
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi (1.03.12.1.01.02)	7.151.099.192,00	7.131.070.472,00	20.028.720,00	99,72	100,00
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (1.03.12.1.01.03)	71.187.100,00	68.816.437,00	2.370.663,00	96,67	100,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (1.03.12.1.01.04)	72.309.000,00	64.209.000,00	8.100.000,00	88,80	100,00
	Masih adanya sisa dana dari makan minum sosialisasi yang tidak terserap dikarenakan adanya pembatasan peserta selama pandemi					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp7.264.095.909,00						
Keluaran : - 1 Dokumen RT RW/ RTR yang disusun dan ditetapkan - 1 dokumen Peraturan Daerah (PERDA) - Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang 24 Kab./Kota						
Hasil : 1 Dokumen Materi Teknis RRTR Provinsi						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	358.282.500,00	310.350.331,00	47.932.169,00	86,62	100,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi (1.03.12.1.02.02)	158.895.500,00	152.332.198,00	6.563.302,00	95,87	100,00
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (1.03.12.1.02.03)	199.387.000,00	158.018.133,00	41.368.867,00	79,25	100,00
	Kurangnya kab./kota yang memasukkan permohonan evaluasi ranperda ,karena adanya aturan perundang-undangan yang harus disesuaikan oleh kab./kota sehingga honor narasumber dan makan minum tidak dapat terserap secara keseluruhan					
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp310.350.331,00						
Keluaran : - Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan 1 Dokumen - Jumlah Ranperda Tata ruang yang dievaluasi 1 Dokumen						
Hasil : - Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan 4 Dokumen - Jumlah Ranperda Tata ruang yang dievaluasi 4 Dokumen						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Makassar						
03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.768.816.600,00	2.754.118.532,00	14.698.068,00	99,47	100,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (1.03.12.1.03.01)	102.015.000,00	89.345.932,00	12.669.068,00	87,58	100,00
	Adanya honorarium narasumber tidak dapat terserap dikarenakan adanya SK.Forum TKPRD yang baru terbit pada akhir bulan November 2021					
2	Sistem Informasi Penataan Ruang (1.03.12.1.03.02)	2.666.801.600,00	2.664.772.600,00	2.029.000,00	99,92	100,00
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp2.754.118.532,00						
Keluaran : Persentase layanan Informasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah						

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Keu	% Fisik
Hasil : - Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Tata Ruang di 24 Kab/Kota - Berfungsinya SIMTARU dalam penyebar luasan Informasi dan pelayanan perizinan Tata Ruang (100 %)						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan						
04	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	2.039.150.925,00	2.007.288.365,00	31.862.560,00	98,44	99,16
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (1.03.12.1.04.02)	1.932.953.625,00	1.930.345.225,00	2.608.400,00	99,87	100,00
2	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (1.03.12.1.04.03)	35.895.600,00	27.915.600,00	7.980.000,00	77,77	87,46
Pengadaan papan bicara tidak dapat dicairkan akibat kesalahan penempatan mata anggaran pada belanja komponen rambu-rambu yang seharusnya masuk di belanja modal. Akan dianggarkan kembali di tahun 2022						
3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (1.03.12.1.04.04)	70.301.700,00	49.027.540,00	21.274.160,00	69,74	87,46
Adanya batasan jumlah peserta perjalanan dinas sehingga mengakibatkan masih adanya sisa anggaran sppd dalm daerah dan juga adanya honor narasumber yang tidak terserap dikarenakan SK. Forum TKPRD selesai di tanda tangani pada bulan November 2021						
Masukan : Dana yang direalisasikan Rp2.007.288.365,00						
Keluaran : Persentase wilayah yang di kendalikan pemanfaatan ruangnya						
Hasil : - Lokasi aduan atau pelanggaran yang di tindak lanjuti (5 Kab/Kota) - PPNS yang melaksanakan operasional dan tugas pada bidang Penataan Ruang (33 orang) - Terlaksananya koordinasi Penataan Ruang 24 Kab/Kota						
Sumber Dana : APBD						
Lokasi : Tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten / Kota)						

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan selama Tahun 2021, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakan dengan Optimal, dibuktikan dengan adanya pencapaian target penerimaan hanya sebesar 92,25%, hal ini disebabkan belum maksimalnya penerimaan atas hasil retribusi sewa rumah dinas dan sewa alat berat. Terkait Belanja Operasi, hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yakni adanya efisiensi anggaran khususnya pada Perjalanan Dinas dikarenakan adanya refocusing anggraran yang membuat kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disamping juga dampak dari Pandemi Covid 19 di Tahun 2021.

BAB. III

PENJELASAN POS – POS KEUANGAN

3.1. Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1. Pendapatan - LRA

2021		2020
Anggaran	Realisasi	Realisasi
2.482.980.000,00	2.287.562.800,00	1.694.565.500,00

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp2.482.980.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp2.287.562.800,00** atau tercapai **92,13%**. Pendapatan Tahun 2021 diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari :

No.	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	% tase
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	53.580.000,00	46.130.000,00	86,10
2	Retribusi Penyewaan Tanah	134.400.000,00	163.200.000,00	121,43
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.000.000.000,00	1.841.332.800,00	92,22
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	295.000.000,00	236.900.000,00	80,31
	Jumlah	2.482.980.000,00	2.287.562.800,00	92,13

3.1.2. Belanja

2021		2020
Anggaran	Realisasi	Realisasi
1.125.710.089.060,00	1.045.300.404.343,00	723.110.252.436,80

Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel Tahun 2021 direncanakan sebesar **Rp1.125.710.089.060,00**, per akhir tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar **Rp1.045.300.404.343,00** atau **92,86%** yang berarti masih tersisa anggaran sebesar **Rp80.409.684.717,00** atau **7,14%**. Realisasi Tahun Anggaran 2021 diatas meningkat **44,56%** dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp723.110.252.436,80**

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

3.1.2.1. Belanja Operasi

2021		2020
Anggaran	Realisasi	Realisasi
325.537.555.247,00	289.940.971.051,00	187.835.920.120,80

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp325.537.555.247,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp289.940.971.051,00** atau **89,07%**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp35.596.584.196,00** atau **10,93%**. Realisasi tersebut meningkat **Rp102.105.051.430,20** atau **54,36%** dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp187.835.920.120,80**.

Belanja Operasi terdiri dari:

No.	Jenis Belanja Operasi	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	59.624.067.525,00	59.305.127.426,00	99,47	61.802.457.169,00
2	Belanja Barang	195.661.290.645,00	162.813.148.984,00	83,21	74.817.096.071,80
3	Belanja Hibah	70.252.197.077,00	67.822.695.141,00	96,54	51.216.366.880,00
Jumlah		325.537.555.247,00	289.940.971.551,00	89,07	187.835.920.120,80

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar **Rp59.624.067.525,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp59.305.127.426,00** atau **99,47%**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp318.940.099,00** atau **0,53%**. Realisasi tersebut turun **4,04%** dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp61.802.457.169,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Pegawai	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	34.286.085.552,00	33.977.232.961,00	99,10	36.314.594.320,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	25.337.981.973,00	25.327.894.465,00	99,96	25.392.808.249,00
Jumlah		59.624.067.525,00	59.305.127.426,00	99,47	61.802.457.169,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar **Rp195.661.290.645,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp162.813.148.484,00** atau **83,21%**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp32.848.141.661,00** atau **16,79%**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 meningkat **117,61%** dari Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp87.996.052.912,20**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dirincikan sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	10.513.040.580,00	8.539.272.850,00	81,23	1.067.397.150,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.860.000,00	216.000,00	4,44	
3	Belanja Jasa Kantor	20.724.797.242,00	18.395.735.591,00	88,76	17.142.932.033,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	310.000.000,00	309.000.000,00	99,68	55.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.291.638.121,00	30.787.602.134,00	84,83	
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.787.245.000,00	4.787.245.000,00	100,00	
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.124.693.000,00	1.162.251.250,00	54,70	

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.736.309.000,00	1.730.495.854,00	99,67	
10	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.038.870.566,00	88.777.405.830,00	87,00	
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.129.837.136,00	8.323.923.975,00	48,59	6.515.356.725,00
12	Belanja Bahan / Material				11.599.149.150,00
13	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				927.913.982,00
14	Belanja Cetak dan Penggandaan				315.113.650,00
15	Belanja Makanan dan Minuman				426.093.000,00
16	Belanja Pakaian Kerja				59.862.000,00
17	Belanja Pemeliharaan				32.122.209.491,80
18	Belanja Jasa Konsultasi				4.586.068.890,00
Jumlah		195.661.290.645,00	162.813.148.484,00	83,21	74.817.096.071,80

3. Belanja Hibah

No.	Jenis Belanja Hibah	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	100,00	
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	58.152.197.077,00	55.722.695.141,00	95,82	
3	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0,00	0,00	
5	Belanja Barang yang Akan diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga				13.078.163.658,00
6	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat				38.138.203.222,00
Jumlah		70.252.197.077,00	67.822.695.141,00	96,54	51.216.366.880,00

Belanja Hibah Tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar **Rp67.822.695.141,00** atau **96,54%** dari anggaran yang direncanakan. Dibandingkan Tahun 2020, realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 meningkat **Rp16.606.328.261,00** atau **32,42%**. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

Jenis Belanja Hibah	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Hibah Uang kepada pemerintah pusat	Pembangunan Fasilitas Kodam XIV Tahun 2021	11.500.000.000,00
	Renovasi Gedung Kantor SAT PJR Ditlantas Polda Sulawesi Selatan	600.000.000,00
	JUMLAH	12.100.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Perencanaan Pembangunan Gedung Makomen Brimob Polda Sulsel 100%)	153.477.060,00
	Pembangunan Gedung Makomen Brimob Polda Sulsel (lanjutan)	4.671.609.639,00

Jenis Belanja Hibah	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
	Pengawasan Pembangunan Gedung Makomen Brimob Polda Sul-Sel	631.105.200,00
	Pematangan Lahan SPN Maros	2.933.910.068,00
	Pembangunan Flat Dalmas Polda Sulsel (100%)	44.953.226.851,00
	Pengawasan Teknis Pembangunan Flat Dalmas Polda Sulsel	1.551.161.883,00
	Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar	84.804.500,00
	Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar	495.696.000,00
	Pengawasan Teknis Pembangunan Cabang Rutan Kelas 1 Makassar	41.045.620,00
	Perencanaan Teknis (DED) Mess Bintara/ Tamtama di Makoopsau	101.276.560,00
	Pekerjaan DED Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan Dit Intelkam Polda Sulsel	105.381.760,00
	JUMLAH	55.722.695.141,00
	JUMLAH TOTAL	67.822.695.141,00

3.1.2.2. Belanja Modal

2021		2020
Anggaran	Realisasi	Realisasi
800.172.533.813,00	755.359.433.292,00	535.274.332.316,00

Belanja Modal direncanakan sebesar **Rp800.172.533.813,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp755.359.433.292,00** atau **94,40%**. Dengan demikian tersisa anggaran sebesar **Rp44.813.100.521,00** atau **5,60%**. Realisasi tersebut meningkat **41,12%** dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp535.274.332.316,00**

Belanja Modal terdiri dari:

No.	Jenis Belanja Modal	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Tanah	619.330.955,00	277.436.632,00	44,80	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.269.744.980,00	3.913.738.700,00	74,27	5.645.338.415,00
3	Gedung dan Bangunan	66.801.913.490,00	60.840.165.611,00	91,08	9.592.686.905,00
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	727.410.979.388,00	690.328.092.349,00	94,90	520.036.306.996,00
5	Aset Tetap Lainnya	70.565.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		800.172.533.813,00	755.359.433.292,00	94,40	535.274.332.316,00

Berdasarkan Tabel di atas, Belanja Modal Selama Tahun Anggaran 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel T.A. 2021 direncanakan sebesar **Rp619.330.955,00** dapat direalisasi sebesar **Rp277.436.632,00** atau **44,80%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp341.894.323,00**. Tidak ada realisasi belanja modal tanah tahun 2020.

Rincian Belanja Modal Tanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	Jenis Belanja Modal Tanah	TAHUN 2021			TAHUN 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Tanah Persil	99.330.000,00	99.330.000,00	100,00	0,00
2	Lapangan	520.000.955,00	178.106.632,00	34,25	0,00
Jumlah		619.330.955,00	277.436.632,00	44,80	0,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2021 terdiri atas seluruh persiapan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umuum dan Tata Ruang Prov. Sulsel T.A. 2021 direncanakan sebesar **Rp5.269.744.980,00** dapat direalisasi sebesar **Rp3.913.738.700,00** atau **74,27%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp1.356.006.280,00**. Realisasi T.A.2021 turun **Rp1.731.599.715,00** dari realisasi T.A. 2020 sebesar **Rp5.645.338.415,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak dapat dibandingkan per rekening jenis belanja dengan realisasi tahun lalu dikarenakan adanya perbedaan penggolongan dan pengkodean rekening sesuai Permendagri No.108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah

Rincian belanja Peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	TAHUN 2021			TAHUN 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Besar Darat	0,00	0.00	0.00	
2	Alat Bantu	680.962.000,00	618.412.000,00	90,81	
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.155.960.000,00	616.609.000,00	53,34	1.130.400.000,00
4	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	73.324.000,00	39.424.000,00	53,77	0,00
5	Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alat Ukur	1.031.430.100,00	929.720.000,00	90,14	75.102.650,00
7	Alat Pengolahan	600.000,00	0,00	0,00	
8	Alat Kantor	749.107.500,00	610.376.000,00	81,48	259.403.400,00
9	Alat Rumah Tangga	425.003.000,00	388.122.400,00	91,32	
10	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	367.110.000,00	181.852.000,00	49,54	
11	Peralatan Komunikasi Navigasi	21.494.000,00	21.494.000,00	100,00	245.226.000,00
12	Alat Kesehatan Umum	55.718.080,00	0,00	0,00	
13	Unit Alat Laboratorium	28.900.000,00	0,00	0,00	

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	TAHUN 2021			TAHUN 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14	Komputer Unit	516.959.900,00	419.979.900,00	81,24	1.061.277.840,00
15	Peralatan Komputer	161.736.400,00	87.749.400,00	54,25	
16	Alat Pelindung	1.440.000,00	0,00	0,00	
17	Alat –Alat Berat				1.556.908.000,00
18	Perlengkapan Kantor				215.280.000,00
19	Mebeulair				54.128.525,00
20	Peralatan Dapur				22.056.000,00
21	Penghias Ruangan Rumah Tangga				6.450.000,00
22	Alat-alat Studio				46.640.000,00
23	Alat-alat Laboratorium				823.570.000,00
24	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan				148.896.000,00
Jumlah		5.269.744.980,00	3.913.738.700,00	74,27	5.645.338.415,00

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp60.840.165.611,00** atau sebesar **91,08%** dari Anggaran sebesar **Rp66.801.913.490,00**. Dibandingkan Realisasi tahun 2020, realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2021 meningkat drastis sebesar **534,23%** dari realisasi tahun 2020 sebesar **Rp9.592.686.905,00**. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan beberapa pekerjaan yang belum terlaksana di tahun 2020 telah dianggarkan kembali dan terealisir di tahun 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dapat dirangkum sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Bangunan Gedung Kantor	5.019.805.355,00	4.929.302.329,00	98,20	4.296.080.862,00
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	39.153.581.395,00	35.021.350.947,00	89,45	222.601.165,00
3	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	927.731.100,00	342.312.000,00	36,90	0,00
4	Bangunan Fasilitas Umum	21.700.795.640,00	20.547.200.335,00	94,68	0,00
5	Taman	0,00	0,00	0,00	5.074.004.878,00
Jumlah		66.801.913.490,00	60.840.165.611,00	91,08	9.592.686.905,00

4. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan direncanakan sebesar **Rp727.410.979.388,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp690.328.092.349,00** atau **94,90%**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp37.082.887.039,00** atau **5,10%**. Namun demikian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi Jaringan Tahun Anggaran 2021 meningkat **32,75%** dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp520.036.306.996,00**.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditampilkan dalam tabel berikut :

No.	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Jalan	618.493.738.467,00	591.862.697.081,00	95,69	426.175.434.535,00
2	Jembatan	28.178.131.055,00	18.189.213.232,00	64,55	40.749.612.925,00
3	Bangunan Air Irigasi	79.944.957.805,00	79.482.029.975,00	99,42	
4	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	794.152.061,00	794.152.061,00	100,00	
5	Konstruksi Jaringan Air				53.111.259.536,00
Jumlah		727.410.979.388,00	690.328.092.349,00	94,90	520.036.306.996,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dianggarkan sebesar **Rp70.565.000,00** untuk pengadaan bahan perpustakaan audio visual dan pengadaan software namun tidak terealisasi

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.1.3. Pendapatan – LO

2021	2020
146.536.204.029,78	1.694.565.500,00

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah–LO bersaldo sebesar **Rp146.536.204.029,78**. Realisasi Pendapatan-LO tersebut meningkat **8,547.42%** atau sebesar **Rp144.841.638.529,78** dibandingkan Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp1.694.565.500,00**. Informasi tentang rincian dan penjelasan Pos pendapatan - LO yang terdiri dari:

3.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

2021	2020
2.310.402.800,00	1.694.565.500,00

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2021 bersaldo sebesar **Rp2.310.402.800,00** seluruhnya berasal dari pendapatan retribusi daerah yang terdiri dari :

Jenis Penerimaan	Sumber Pendapatan	Nilai	Keterangan
Retribusi penyewaan tanah dan bangunan	Sewa rumah dinas	62.970.000,00	Piutang Sewa sebesar Rp22.840.000,00
	Sewa mess malino	6.000.000,00	
	Sewa kantin	0,00	
Retribusi penyewaan tanah	Sewa kantor kas Bank Sulselbar	163.200.000,00	
Retribusi pemakaian laboratorium	Sewa laboratorium	1.841.332.800,00	
Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	Sewa alat berat	236.900.000,00	
Jumlah		2.310.402.800,00	

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **36,34%** atau **Rp615.837.300** dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah tahun lalu. Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO sebesar **Rp22.840.000,00** merupakan pendapatan sewa atas 30 unit rumah dinas yang belum tertagih / Piutang. (Rincian terlampir).

3.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

2021	2020
144.225.801.220,18	0,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 sebesar **Rp144.225.801.220,18** merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO yang terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar **Rp144.221.343.624,00**, terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Hibah	Nilai
1	Ruas Jalan Provinsi pada Kab. Tana Toraja Sesuai BAST No. 268/IX/2020/Setda tgl. 22 September 2020	118.837.521.414,18
2	Rest Area Jeneponto Sesuai NPHD No.682/612/X/2021 tgl. 06-10-2021	4.104.129.182,00
3	Rest Area Sidrap Sesuai NPHD No.903/5021/BKAD tgl. 27-08-2021	616.757.000,00
4	Bangunan Gedung Rest Area dan aset Tanah yang sebelumnya telah dihibahkan oleh Pemprov. Sulsel (Koreksi Aset tahun 2020 dan 2021)	20,663,343,624.00
Jumlah		144,221,751,220.18

2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp4.050.000,00** merupakan Pendapatan Hibah atas Stop Area Mini Bira dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sesuai BAST No.92/500/DA/III/2021 tg.10-03-2021.

3.1.4. Beban

2021	2020
582.228.515.135,62	536.097.978.241,30

Pada Tahun Anggaran 2021 Beban bersaldo sebesar **Rp 582.228.515.135,62**, meningkat **Rp46.130.536.894,32** atau **8,60%** dari realisasi tahun lalu.

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

3.1.4.1. Beban Operasi

2021	2020
582.228.515.135,62	536.097.978.241,30

Beban Operasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021sebesar **Rp582.228.515.135,62**. Beban Operasi terdiri dari:

No.	Jenis Beban Operasi	2021	2020	Naik / Turun (%)
1	Beban Pegawai	58.544.155.743,00	64.177.128.945,00	(8,78)
2	Beban Persediaan	13.167.885.941,00	4.069.519.649,00	223,57
3	Beban Jasa	25.039.521.605,67	36.761.759.094,00	(31,89)
4	Beban Pemeliharaan	73.801.346.919,48	18.788.685.357,31	292,80
5	Beban Perjalanan Dinas	8.149.512.038,00	6.760.445.441,00	20,55
7	Beban Hibah	69.216.687.664,52	53.164.391.976,33	30,19
8	Beban Penyusutan	334.301.266.673,95	352.376.047.778,66	(5,13)
9	Beban Penyisihan Piutang	8.138.550,00	0,00	0,00
Jumlah		582.228.515.135,62	536.097.978.241,30	8,60

1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp58.544.155.743,00**

Beban Pegawai terdiri dari:

No.	Jenis Beban Pegawai	2021	2020
1	Beban Gaji dan Tunjangan	33.947.637.448,00	36.344.189.723,00
2	Beban Tambahan Penghasilan (TPP) PNS	24.596.917.225,00	27.737.884.622,00
3	Uang Lembur PNS	0,00	95.054.600,00
Jumlah		58.544.155.743,00	64.177.128.945,00

Beban Pegawai sebesar **Rp58.544.155.743,00** turun **8,78%** dari realisasi tahun 2020 sebesar **Rp64.177.128.945,00**. Terdapat Utang Beban Gaji dan Tunjangan per Desember 2021 sebesar **Rp24.596.917.225,00** yi. TPP PNS Bulan Desember 2021 yang belum terbayarkan.

2. Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 13.167.885.941,00**

Beban Persediaan terdiri dari :

No.	Jenis Beban Persediaan	2021	2020
1	Beban Persediaan Bahan Bangunan	4.884.498.200,00	1.444.393.420,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	19.000.000,00	
3	Beban Bahan-Bahan Bakar, Pelumas dan Gas	785.227.400,00	938.854.600,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	5.074.933.111,00	
5	Beban Bahan-Bahan Lainnya	135.829.030,00	
6	Beban Suku Cadang	36.599.000,00	
7	Beban Bahan Pakai Habis	1.443.956.200,00	1.260.178.629,00
8	Beban Makanan dan Minuman	701.367.000,00	426.093.000,00
9	Beban Pakaian Kerja	86.260.000,00	
10	Beban Komponen	216.000,00	
Jumlah		13.167.885.941,00	4.069.519.649,00

Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar **Rp13.167.885.941,00** meningkat **223,57%** dari realisasi tahun 2020 sebesar **Rp4.069.519.649,00**. Tidak ada utang beban persediaan TA. 2021.

3. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp25.039.521.605,67**

Beban Jasa terdiri dari:

No.	Jenis Beban Jasa	2021	2020
1	Beban Jasa Kantor	17.454.194.336,00	17.257.913.620,00
2	Beban Pajak, Bea, dan Perizinan	141.524.576,00	
3	Beban Lembur	288.943.000,00	
4	Beban Asuransi	76.166.666,67	51.837.500,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor (excl.BBM)		776.596.482,00
6	Beban Penggandaan		59.523.950,00
7	Beban Sewa		0,00
8	Beban Jasa Konsultasi	6.824.943.027,00	18.556.025.542,00
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		0,00
10	Honor Narasumber, moderator dan panitia	253.750.000,00	0,00
Jumlah		25.039.521.605,67	36.761.759.094,00

Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 turun **31,89%** atau sebesar **Rp11.722.237.488,33** dari realisasi tahun 2020 sebesar **Rp36.761.759.094,00**. Utang beban Jasa per 31 Desember 2021 sebesar **Rp227.182.323,00**

4. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp73.801.346.919,48**

Beban Pemeliharaan terdiri dari :

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	2021	2020
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar	299.671.350,00	90.000.656,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan	660.589.400,00	
4	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.386.640,00	
6	Beban Pemeliharaan Alat Studio	0,00	
7	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium	54.889.500,00	
8	Beban Pemeliharaan Komputer	80.870.000,00	
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.004.874.915,28	37.448.400,00
10	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol	0,00	
11	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.724.909.676,00	18.661.236.301,31
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Air	58.911.155.438,20	
13	Beban Pemeliharaan Instalasi	0,00	
14	Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	
15	Beban Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	
Jumlah		73.801.346.919,48	18.788.685.357,31

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2021 sebesar **Rp73.801.346.919,48** meningkat **292,80%** dari realisasi tahun 2020 sebesar **Rp18.788.685.357,31**. Tidak ada utang beban pemeliharaan yang timbul di tahun 2021.

5. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp8.149.512.038,00**

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari:

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	2021	2020
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.846.067.698,00	6.760.445.441,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	272.044.340,00	
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.400.000,00	
	Jumlah	8.149.512.038,00	6.760.445.441,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar **Rp8.149.512.038,00** meningkat **20,55%** dari realisasi tahun lalu sebesar **Rp6.760.445.441,00**. Tidak ada utang beban perjalanan dinas yang timbul di tahun 2021.

6. Beban Bunga

Saldo Beban Bunga Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp0,00**.

7. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 69.216.687.664,52**

Beban Hibah terdiri dari:

No.	Jenis Beban Hibah	2021	2020
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.386.066.653,52	
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	54.938.112.881,00	
3	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	892.508.130,00	
4	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		14.190.742.351,00
5	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		38.973.649.625,33
	Jumlah	69.216.687.664,52	53.164.391.976,33

Realisasi Beban Hibah Tahun 2021 sebesar **Rp69.216.687.664,52** meningkat **30,19%** dari realisasi tahun 2020 sebesar **Rp53.164.391.976,33**. Jumlah utang beban hibah per 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.671.847.343,32**

8. Beban Penyusutan

Saldo Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp332.839.453.254,55**

Beban Penyusutan terdiri dari :

No.	Jenis Beban Penyusutan	2021	2020
1	Beban Penyusutan Tractor	4.281.201.900,75	
2	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.544.685.313,18	
3	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	196.250.373,39	
4	Beban Penyusutan Mesin Ketik	1.595.886.049,05	
5	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	99.264.947,66	
6	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	644.142.999,59	
7	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	828.461.657,48	
8	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	3.061.791.071,54	
9	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	592.272.725,56	
10	Beban Penyusutan Jalan Provinsi	300.878.898.661,71	
11	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	18.416.241.677,20	
12	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	44.456.757,72	
13	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	37.669.747,46	
14	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	80.042.791,66	
15	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat		10.887.908.183,98
16	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.564.313.707,75
17	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		338.923.825.886,93
Jumlah		334.301.266.673,95	352.376.047.778,66

Beban Penyusutan tahun 2021 sebesar **Rp334.301.266.673,95** turun **5,13%** dari Beban penyusutan tahun 2020 sebesar **Rp352.376.047.778,66**. Penghitungan Beban Penyusutan tahun 2021 berdasarkan Pergub Sulsel No.46 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021.

9. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar **Rp 8.138.550,00** merupakan beban penyisihan atas piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan tahun 2021 sebesar **Rp22.800.000,00**.

3.1.4.2. Defisit Non Operasional

2021	2020
0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan nilai defisit dari Kegiatan Penjualan Aset Non Lancar / Penghapusan Aset / Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang / Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran 2021, sebesar **Rp0,00**.

NERACA

Neraca digunakan untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3.1.5. Aset

31 Desember 2021	31 Desember 2020
4.748.004.077.850,06	4.148.174.652.098,34

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

No.	Uraian	31/12/2021	31/12/2020
1	Aset Lancar	42.131.919.530,92	61.625.668.946,71
2	Aset Tetap	4.588.914.608.952,14	3.969.591.433.784,63
3	Aset Lainnya	116.957.549.367,00	116.957.549.367,00
Jumlah		4.748.004.077.850,06	4.148.174.652.098,34

3.1.5.1. Aset Lancar

31/12/2021	31/12/2020
42.131.919.530,92	61.625.668.946,71

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lainnya, dan persediaan. Saldo Aset Lancar Pada Neraca Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp42.131.919.530,92** dan per 31 Desember 2020 **Rp61.625.668.946,71** dengan rincian:

No.	Uraian	31/12/2021	31/12/2020
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.498.343,00	375.432.432,00
3	Piutang Retribusi	106.780.000,00	83.940.000,00
4	Penyisihan Piutang	(119.115.639,00)	(110.977.089,00)
5	Belanja Dibayar di Muka	283.250.000,00	23.568.670.587,71
6	Uang Muka	8.911.794.481,92	0,00
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	271.158.000,00	
8	Piutang Lainnya	27.037.089,00	27.037.089,00
9	Persediaan	32.641.517.256,00	37.681.565.927,00
Jumlah		42.131.919.530,92	61.625.668.946,71

1. Kas di Bendahara Penerimaan

31/12/2021	31/12/2020
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00**.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

31/12/2021	31/12/2020
9.498.343,00	375.432.432,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp9.498.343,00**. Nilai tersebut adalah selisih antara Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dengan Sisa Saldo Buku Kas Pengeluaran setelah dilakukan rekonsiliasi, yang merupakan jumlah rekapitulasi dobel bayar surat pertanggungjawaban (SPJ) bulan Desember 2021.

Rincian Sisa saldo kas Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Kelebihan Bayar Kwitansi An. Andi Sahwan Mulia Rahman	Rp 3.041.937,00
2. Kelebihan Bayar Kwitansi An. Ramlan Purnama	Rp 2.425.000,00
3. Kelebihan Bayar Kwitansi An. Andi Sahwan Mulia Rahman	Rp 430.000,00
4. Kelebihan Bayar Kwitansi An. Ramlan Purnama	Rp 430.000,00
5. Kelebihan Bayar Kwitansi An. Ervin	Rp 1.830.000,00
6. Kelebihan Bayar Kwitansi An. CV. Planindo	Rp 375.000,00
7. Kelebihan Bayar Kwitansi An. CV. Sadjari Perdana	Rp 353.000,00
8. Kelebihan Bayar Pajak	<u>Rp 613.406,00</u>
Jumlah	Rp 9.498.343,00

Atas kelebihan bayar tersebut telah disetor kembali ke kasda dengan dengan bukti penyetoran :

- STS No. 00347 tgl. 10 Januari 2022	Rp 9.022.843,00
- STS No. 00969 tgl. 19 Januari 2022	Rp 475.000,00
- STS No. 001068 tgl. 21 Januari 2022	<u>Rp 500,00</u>
Jumlah	Rp 9.498.343,00

3. Piutang Retribusi

31/12/2021	31/12/2020
106.780.000,00	83.940.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp106.780.000,00** merupakan piutang atas hasil sewa rumah dinas (eks. Dinas Bina Marga) yang belum diterima sejak Tahun 2011 sebesar Rp83.940.000,00 serta piutang atas pendapatan sewa rumah dinas milik Dinas PUTR Tahun 2021 sebesar **Rp22.840.000,00**

Rekap Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

Tahun	Uraian	Nominal
2014	Saldo akhir Piutang Sewa s/d T.A. 2014	38.040.000,00
2015	Tagihan Sewa T.A. 2015	35.100.000,00
2016	Tagihan Sewa T.A. 2016	10.800.000,00
2021	Tagihan Sewa T.A. 2021	22.840.000,00
	Jumlah	106.780.000,00

4. Penyisihan Piutang

31/12/2021	31/12/2020
(119.115.639,00)	(110.977.089,00)

Saldo Penyisihan Piutang sebesar **Rp119.115.639,00** adalah nilai penyisihan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang	% tase	Nilai Penyisihan Piutang
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	≤ 2016	83.940.000,00	100%	(83.940.000,00)
2	Piutang Lainnya	2008	27.037.089,00	100%	(27.037.089,00)
3	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2021	15.280.000,00	50%	(7.640.000,00)
			4.850.000,00	10%	(485.000,00)
			2.710.000,00	0,50%	(13.550,00)
Jumlah			133.777.089,00		(119.115.639,00)

5. Belanja Dibayar Dimuka

31/12/2021	31/12/2020
283.250.000,00	23.568.670.587,71

Saldo Awal Belanja Dibayar di Muka Tahun 2021 sebesar **Rp23.568.670.587,71** berupa:

- Beban Premi Asuransi dibayar di muka sebesar **Rp50.416.666,67**
- Selisih lebih realisasi keuangan terhadap realisasi fisik pekerjaan Tahun 2020 sebesar **Rp23.518.253.921,04** (saldo akhir tahun 2021 dipindahkan pencatatannya ke rekening Uang Muka)

Premi asuransi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel pada PT. Asuransi Eka Lloyd Jaya telah jatuh tempo pada bulan November 2021 dan diperpanjang kembali dengan jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun (17 November 2021 s/d 17 November 2022) dengan perincian sebagai berikut:

Obyek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel : - Gedung dan Bangunan I & II - Gedung Ex.Dinas Sumber Daya Air	Asuransi Property All Risk	23.100.000.000,00	92.341.150,00
Kendaraan Dinas Roda Empat (22 Unit)	Asuransi Kendaraan Bermotor	9.387.963.000,00	199.000.000,00
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel : - Gedung dan Bangunan (2 unit) - Gedung Ex.Dinas Sumber Daya Air (4 unit)	Asuransi Gempa Bumi	23.100.000.000,00	17.658.850,00
Jumlah		55.587.963.000,00	309.000.000,00

Saldo akhir Belanja dibayar di muka tahun 2021 sebesar **Rp283.250.000,00** merupakan saldo beban premi asuransi dibayar di muka.

6. Uang Muka

31/12/2021	31/12/2020
8.911.794.481,92	0,00

Selisih lebih realisasi keuangan terhadap realisasi fisik pekerjaan Tahun 2020 sesuai hasil Reviu BPK yang dicatat sebagai beban dibayar di muka sebesar **Rp23.518.253.921,04** telah terselesaikan sebesar **Rp22.826.060.098,39** yang dibuktikan dengan progres realisasi fisik per 31 Desember 2021 yang telah melampaui realisasi keuangannya, sehingga akan menambah nilai aset tersebut.

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 8.911.794.481,91**, merupakan pencatatan atas uang muka pekerjaan yang putus kontrak pada akhir tahun 2021 namun belum ada progress realisasi fisik (rincian lengkap terlampir).

7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31/12/2021	31/12/2020
271.158.000,00	0,00

Sesuai LHP Inspektorat No.700.04/1011/B.I/ITPROV No.003/XI/SKTJM/TAHUN 2021 tgl. 04 November 2021 saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar **Rp301.158.000,00** merupakan saldo piutang atas Jasa Konsultasi Supervisi/Pengawasan Pembangunan Islamic Centre di Kabupaten Bone yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan waktu pelaksanaan An. PT. SULAPA APPA MEDIA UTAMA.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran Jasa Konsultasi selama tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tgl STS	No.STS	Nilai	Saldo
			301.158.000,00
23-12-2021	34383	15.000.000,00	286.158.000,00
26-12-2021	29680	15.000.000,00	271.158.000,00

8. Piutang Lainnya

31/12/2021	31/12/2020
27.037.089,00	27.037.089,00

Saldo Piutang Lainnya sebesar **Rp27.037.089,00** merupakan denda atas pembayaran kontrak (SP2D) yang belum dipotong saat pembayaran di Kas Daerah Tahun 2008. Nilai tersebut tidak bisa ditagihkan karena perusahaan kontraktor bersangkutan telah tutup.

9. Persediaan

31/12/2021	31/12/2020
32.641.517.256,00	37.681.565.927,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp32.641.517.256,00** (daftar stock opname persediaan terlampir) turun sebesar **Rp5.040.048.671,00** atau **13,37%** dari posisi persediaan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp37.681.565.927,00**

Nilai Persediaan dirincikan sebagai berikut :

No.	Jenis Persediaan	31/12/2021	31/12/2020
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.998.549.544,00	12.073.482.655,00
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	32.618.500,00	0,00
3	Bahan Komputer	600.000,00	
4	Perabot Kantor	6.014.360,00	
5	Alat Listrik dan Elektronik	2.850.500,00	7.879.000,00
6	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.600.884.352,00	25.534.254.272,00
7	Bahan / Alat -Alat Kesehatan	0,00	47.520.000,00
8	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		4.170.000,00
9	Bahan Laboratorium		14.260.000,00
10	Persediaan Bahan Cetakan		0,00
Jumlah		32.641.517.256,00	37.681.565.927,00

Keterangan :

Persediaan Untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat sebesar **Rp25.600.884.352,00** terdiri atas:

- Pekerjaan Rehabilitasi dan Perbaikan Daerah/Saluran Irigasi pada lokasi yang berada dalam wewenang Kabupaten sebanyak 106 paket pekerjaan dengan nilai **Rp18.688.671.000,00** dan lokasi yang berada dalam wewenang Pusat sebanyak 3 paket pekerjaan dengan nilai **Rp489.146.000,00** yang semula dianggarkan sebagai Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Hasil Review Inspektorat pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017).
- Pembangunan Cekdam Bontocani Kab. Bone dan Pembangunan Cekdam Gunung Silanu Kab. Jeneponto yang direklass dari KDP ke Persediaan Hibah sebesar **Rp6.356.437.272,00** (Hasil Koreksi BPK Atas Kesalahan Pencatatan Tahun 2021).
- DED Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan DIT Intelkam Polda Sulsel, DED Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, DED Renovasi Mess Bintara / Tamtama di Makoopsau II total sebesar **Rp66.630.080,00** (Berdasarkan hasil reuiu Inspektorat atas LKPD Prov. SULSEL TA. 2021).

3.1.5.2. Aset Tetap

31/12/2021	31/12/2020
4.588.914.608.952,14	3.969.591.433.784,63

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Saldo Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp4.549.145.626.719,32** dan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp3.969.591.433.784,63**, dengan perincian :

3.1.5.2.1. Tanah

31/12/2021	31/12/2020
1.819.663.748.803,87	1.696.666.265.559,53

Tanah Kantor

Tanah Kantor merupakan nilai tanah kantor per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	1.696.666.265.559,53
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Tanah Bangunan Perumahan	Rp	156.855.000,00
- Tanah Untuk Jalan	Rp	4.482.783.158,00
- Tanah Kering	Rp	(4.597.359.500,00)
- Tanah Perkebunan	Rp	(30.261.000,00)
- Tanah Kampung	Rp	(12.017.658,00)
Penambahan aset dari Hibah Ruas Jalan Provinsi dari Pem. Kab. Tana Toraja (BAST No.268/IX/2020/Setda tanggal 22 September 2020) ke Tanah Untuk Jalan	Rp	106.146.400.000,00
Penambahan asset dari Hibah Tanah Rest Area Jeneponto Dari PemKab Jeneponto (NPHD No. 682/612/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021)	Rp	4.104.129.182,00
Penambahan asset dari Hibah Tanah Rest Area Sidrap Dari PemKab Sidenreng Rappang (BAST No. 903/5020/BKAD tanggal 27 Agustus 2021)	Rp	616.757.000,00
Penambahan asset dari Hibah Tanah Stop Area Mini Bira Dari PemKab Bulukumba (Surat Keterangan Kepala Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba No. 92/500/DA/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 (BAST No. 903/5020/BKAD tanggal 27 Agustus 2021)	Rp	4.050.000,00
Realisasi Belanja Modal Tanah T.A. 2021	Rp	277.436.632,00
Reklasifikasi Aset Tanah (Pembebasan Lahan) dari KDP	Rp	12.126.147.062,34
Reklasifikasi Aset ke KDP	Rp	(277.436.632,00)
Jumlah	Rp	1.819.663.748.803,87

3.1.5.2.2. Peralatan dan Mesin

31/12/2021	31/12/2020
127.794.282.434,30	125.452.512.634,30

Peralatan dan mesin merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar **Rp127.794.282.434,30** yang terdiri dari:

1. Alat Besar

31/12/2021	31/12/2020
51.774.056.176,80	59.350.796.276,80

Alat Besar merupakan nilai alat-alat besar per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	59.350.796.276,80
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Excavator	Rp	1.998.500.000,00
- Asphalt Equipment	Rp	672.762.680,00
- Compacting Equipment	Rp	14.463.098.881,80
- Compressor	Rp	389.041.320,00
- Electric Generating Set	Rp	149.600.000,00
- Pompa	Rp	836.122.000,00

- Unit Pemeliharaan Lapangan	Rp	206.250.000,00
- Hauler	Rp	(9.986.461.100,00)
- Asphalt Equipment	Rp	(14.463.098.881,80)
- Unit Pemeliharaan Lapangan	Rp	(2.140.505.000)
Realisasi Belanja Modal Alat Besar T.A. 2021	Rp	618.412.000,00
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(195.590.000,00)
Reklasifikasi Aset atas Utang Barang dan Jasa 2020 ke Beban Persediaan dan Beban Pemeliharaan	Rp	(124.872.000,00)
Jumlah	Rp	51.774.056.178,80

Rincian Aset Alat Besar dapat dilihat pada Laporan Aset.

2. Alat Angkutan

31/12/2021	31/12/2020
38.018.703.757,50	27.767.663.557,50

Alat Angkutan merupakan nilai alat-alat angkutan per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	27.767.663.557,50
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Kendaraan Dinas Perorangan	Rp	6.860.016.000,00
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	9.986.461.100,00
- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Rp	34.055.100,00
- Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	(1.978.200.000,00)
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	(4.881.816.000,00)
Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan T.A. 2021	Rp	656.033.000,00
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(39.424.000,00)
Mutasi Kendaraan Dinas ke BPSDM Prov.Sulsel	Rp	(171.200.000,00)
Penghapusan Aset Alat Angkutan berdasarkan SK Gubernur Sulsel No.1189/V/Tahun 2021 tgl. 05-05-2021:		
- Kendaraan Dinas ST Wagon DD 295 AF	Rp	(196.900.000,00)
- Kendaraan Dinas Sepeda Motor DD 3818	Rp	(17.985.000,00)
Jumlah	Rp	38.018.703.757,50

Rincian Aset Alat Angkutan dapat dilihat pada Laporan Aset.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

31/12/2021	31/12/2020
2.510.146.048,00	2.726.179.400,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur merupakan nilai alat-alat bengkel dan alat-alat ukur per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	2.726.179.400,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	Rp	3.672.000,00
- Perkakas Pengangkat Bermesin	Rp	405.100.000,00
- Perkakas Standard	Rp	3.100.000,00
- Peralatan Tukang Besi	Rp	1.000.000,00
- Alat Ukur Universal	Rp	433.025.000,00
- Alat Ukur Pembanding	Rp	15.750.000,00

- Takaran Lainnya	Rp	1.000.000,00
- Specific Set	Rp	41.496.048,00
- Perkakas Bengkel Listrik	Rp	(149.600.000,00)
- Perkakas Bengkel Servis	Rp	(1.268.054.000,00)
- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Rp	(206.217.400,00)
- Peralatan Bengkel Khusus Pemadam	Rp	(426.025.000)

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur T.A. 2021 Rp 929.720.000,00

Jumlah **Rp 2.510.146.048,00**

Rincian Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dilihat pada Laporan Aset.

4. Alat Pertanian

31/12/2021	31/12/2020
0,00	195.590.000,00

Alat Pertanian merupakan nilai alat-alat pertanian per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 195.590.000,00

Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:

- Alat-alat Peternakan Rp (195.590.000,00)

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA.2021 Rp 0,00

Jumlah **Rp 0,00**

Rincian Aset Alat Pertanian dapat dilihat pada Laporan Aset.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

31/12/2021	31/12/2020
14.875.669.390,00	21.044.530.343,00

Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga merupakan nilai alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 21.044.530.343,00

Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:

- Alat Kantor Lainnya Rp 1.980.291.200,00

- Alat Pendingin Rp 3.000.000,00

- Alat Dapur Rp 21.898.000,00

- Alat Rumah Tangga Lainnya Rp 1.180.773.000,00

- Alat Pemadam Kebakaran Rp 4.200.000,00

- Mesin Hitung/Mesin Jumlah Rp (21.735.000,00)

- Alat Kantor Lainnya Rp (9.033.753.553,00)

- Alat Pembersih Rp (110.660.000,00)

- Alat Rumah Tangga Lainnya Rp (865.870.000,00)

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga T.A. 2021 Rp 1.180.350.400,00

Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan pada KIB:

- Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp 55.500.000,00

- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp 58.576.800,00

- Alat Kantor Lainnya Rp 14.300.000,00

- Meubelair Rp 14.960.000,00

- Alat Pendingin Rp 48.750.000,00

- Meja Rapat Pejabat Rp 34.947.000,00

- Meubelair	Rp	(58.576.800,00)
- Meja Kerja Pejabat	Rp	(34.947.000,00)
- Meja Rapat Pejabat	Rp	(9.900.000,00)
- Kursi Kerja Pejabat	Rp	(14.960.000,00)
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(545.908.000,00)

Reklasifikasi Aset atas Utang Barang dan Jasa
TA. 2020 dari Belanja Modal ke Beban Persediaan
berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap SMT II TA. 2021 Rp (70.097.000,00)

Jumlah **Rp** **14.875.669.390,00**

Rincian Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat dilihat pada Laporan Aset.

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

31/12/2021	31/12/2020
1.396.569.214,00	1.694.362.814,00

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar merupakan nilai alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 1.694.362.814,00

Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan
Permendagri No.108 tahun 2016:

- Peralatan Cetak	Rp	16.600.000,00
- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Rp	415.412.400,00
- Peralatan Studio Gambar	Rp	(1.990.000,00)
- Alat Komunikasi Khusus	Rp	(733.766.000,00)

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan
Alat Rumah Tangga T.A. 2021 Rp 21.494.000,00

Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan pada KIB:
- Peralatan Cetak Rp 5.950.000,00

Pembayaran Utang Tahun 2020 Rp (21.494.000,00)

Jumlah **Rp** **1.396.569.214,00**

Rincian Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat dilihat pada Laporan Aset.

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan

31/12/2021	31/12/2020
4.300.000,00	4.300.000,00

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 4.300.000,00

Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan
Permendagri No.108 tahun 2016:

- Alat Kedokteran Umum	Rp	4.300.000,00
- Alat Kedokteran Nuklir	Rp	(1.300.000,00)
- Alat Kesehatan Umum Lainnya	Rp	(3.000.000,00)

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan
Kesehatan T.A. 2021 Rp 0,00

Jumlah **Rp** **4.300.000,00**

Rincian Aset Alat Kedokteran dan Kesehatan dapat dilihat pada Laporan Aset.

8. Alat Laboratorium

31/12/2021	31/12/2020
10.962.589.043,00	12.385.559.043,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	12.385.559.043,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Rp	2.243.592.000,00
- Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	Rp	1.014.825.050,00
- Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	Rp	188.164.000,00
- Alat Laboratorium Umum	Rp	496.189.300,00
- Alat Laboratorium Lain	Rp	2.000.000,00
- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Rp	(22.750.000,00)
- Alat Laboratorium Hidrokimia	Rp	(229.352.600,00)
- Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	Rp	(42.650.000,00)
- Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	Rp	(229.600.000,00)
- Alat Laboratorium Umum	Rp	(2.151.040.000,00)
- Alat Laboratorium Kimia	Rp	(2.121.868.450,00)
- Alat Laboratorium Film	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Farmasi	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Rp	(156.980.000,00)
- Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit,Karet,Plastik	Rp	(35.175.000,00)
- Alat Laboratorium Pertanian	Rp	(2.000.000,00)
- Alat Laboratorium Energi Surya	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Biologi	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Geofisika	Rp	(319.000.000,00)
- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Rp	(24.625.000,00)
- Instrument Probe/Sensor	Rp	(4.499.300,00)
- General Laboratory Tool	Rp	(3.000.000,00)
- Glassware Plastic/Utensils	Rp	(3.000.000,00)
- Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan	Rp	(10.200.000,00)
- Alat Kesehatan Kerja	Rp	(1.000.000,00)
- Peralatan Hidrologi	Rp	(3.000.000,00)
- Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Kualitas Udara	Rp	(1.000.000,00)
- Alat Laboratorium Penunjang	Rp	(1.000.000,00)
Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan T.A. 2021	Rp	0,00
Jumlah	Rp	10.962.589.043,00

Rincian Aset Laboratorium dapat dilihat pada Laporan Aset.

9. Alat Persenjataan

31/12/2021	31/12/2020
0,00	243.931.200,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	243.931.200,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Alat Keamanan	Rp	(243.931.200,00)
Realisasi Belanja Modal Alat Persenjataan T.A.2021	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Rincian Aset Persenjataan dapat dilihat pada Laporan Aset.

10. Komputer

31/12/2021	31/12/2020
8.251.060.805,00	0,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	0,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Personal Komputer	Rp	5.854.168.361,00
- Peralatan Mainframe	Rp	1.328.001.194,00
- Peralatan Mini Komputer	Rp	67.310.000,00
- Peralatan Personal Komputer	Rp	355.691.000,00
- Peralatan Jaringan	Rp	208.361.000,00
- Peralatan Komputer Lainnya	Rp	46.880.850,00
Realisasi Belanja Modal Komputer T.A.2021	Rp	507.729.300,00
Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan pada KIB:		
- Personal Komputer	Rp	123.550.000,00
- Peralatan Mainframe	Rp	400,00
- Peralatan Personal Komputer	Rp	60.010.000,00
- Personal Komputer	Rp	(23.792.000,00)
- Komputer Unit Lainnya	Rp	(51.700.000,00)
- Peralatan Komputer Lainnya	Rp	(76.250.400,00)
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(148.898.900,00)
Jumlah	Rp	8.251.060.805,00
Rincian Aset Komputer dapat dilihat pada Laporan Aset.		

11. Alat Keselamatan Kerja

31/12/2021	31/12/2020
1.188.000,00	0,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	0,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Sepatu Lapangan	Rp	1.188.000,00
Realisasi Belanja Modal Alat Persenjataan T.A.2021	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.188.000,00
Rincian Aset Alat Keselamatan Kerja dapat dilihat pada Laporan Aset.		

3.1.5.2.3. Gedung dan Bangunan

31/12/2021	31/12/2020
336.937.683.723,45	126.703.098.686,90

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp336.937.683.723,45** terdiri dari:

1. Bangunan Gedung

31/12/2021	31/12/2020
307.376.732.723,45	126.703.098.686,90

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	126.703.098.686,90
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	1.147.392.854,00
- Bangunan Gudang	Rp	1.587.524.500,00
- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	Rp	242.026.495,00
- Bangunan Gedung Laboratorium	Rp	178.694.000,00
- Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp	154.657.375,00
- Taman	Rp	1.326.550.000,00
- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Rp	598.071.854,00
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	(46.338.690.909,00)
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	(29.560.951.000,00)
- Rumah Negara Golongan II	Rp	(66.000.000,00)
- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Rp	(1.147.392.854,00)
Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung T.A. 2021	Rp	60.840.165.611,00
Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan pada KIB:		
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	759.954.551,00
- Taman	Rp	41.248.363,81
- Rumah Tidak Bersusun	Rp	246.419.100,00
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	(107.419.011,00)
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp	(759.954.551,00)
- Fasilitas Umum	Rp	(41.248.363,81)
Kapitalisasi Aset karena perbedaan penganggaran aset tetap bangunan gedung berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester II TA. 2021		
	Rp	75.344.500,00
Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung Tempat Ibadah dari KDP		
	Rp	145.510.769.192,00
Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung dari KDP		
	Rp	2.513.728.649,00
Reklasifikasi Aset Taman dari KDP		
	Rp	19.189.004.811,28
Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dari KDP		
	Rp	2.123.624.765,87
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(19.435.434.892,19)
Reklasifikasi Aset atas Utang Pemeliharaan T.A.2020 dari Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester II T.A 2021		
	Rp	(2.884.618.021,00)
Reklasifikasi Aset atas Utang Barang dan Jasa TA. 2020 dari Belanja Modal ke Beban Hibah berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap semester II TA. 2021		
	Rp	(12.503.767.273,00)
Reklasifikasi Aset ke KDP		
	Rp	(2.874.696.962,00)
Koreksi Aset yang disebabkan oleh perbedaan Pecahan desimal pada penetapan utang TA.2020		
	Rp	(9,90)
Utang Modal 2021	Rp	4.949.321.279,87
Koreksi Aset - atas Bangunan Gedung Rest Area yang sebelumnya dibebankan pada Belanja Hibah dan aset tanah sebelumnya telah dihibahkan oleh Pihak Pemkab. ke Pempov		
	Rp	11.355.758.858,00
Reklasifikasi Aset - Berdasarkan Koreksi Penyesuaian Pemetaan Permendagri No.108 Tahun 2016 Sesuai Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengalihan Rumah Negara dari Bangunan Gedung - Kode: Rumah Negara Golongan III		
	Rp	42.317.166.685,00

Kapitalisasi Aset - Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl. 23-03-2022 dari Beban Jasa Konsultansi ke Aset Tetap:		
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	48.537.500,00
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp	626.456.600,00
Kapitalisasi Aset - Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021 dari Beban Pemeliharaan ke Aset :		
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	134.888.145,57
- Bangunan Gedung	Rp	198.356.803,05
Koreksi Aset - Berdasarkan Reviu Inspektorat Atas LKPD TA. 2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl.23-03-2022 dari Beban Jasa Konsultansi ke Aset Tetap:		
- Bangunan Gedung Kantor	Rp	75.344.500,00
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp	152.800.890,00
Jumlah	Rp	307.376.732.723,45
Rincian Aset Bangunan Gedung dapat dilihat pada Laporan Aset.		

2. Monumen

Tidak ada aset Gedung dan Bangunan yang masuk dalam kelompok kategori Monumen sesuai hasil Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016.
3. Bangunan Menara

Tidak ada aset Gedung dan Bangunan yang masuk dalam kelompok kategori Bangunan Menara sesuai hasil Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016.
4. Tugu Titik Kontrol / Pasti

31/12/2021	31/12/2020	
29.560.951.000,00	0,00	
Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	0,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Pagar	Rp	29.560.951.000,00
Realisasi Belanja Modal Alat Persenjataan T.A.2021	Rp	0,00
Jumlah	Rp	29.560.951.000,00
Rincian Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti dapat dilihat pada Laporan Aset.		

3.1.5.2.3. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31/12/2021	31/12/2020
	8.466.316.518.255,21	7.250.573.350.458,50

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan dan Jembatan, Bangunan Air Irigasi, Instalasi serta Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

1. Jalan dan Jembatan

31/12/2021	31/12/2020
7.777.607.542.823,77	6.693.440.640.856,50

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	6.693.440.640.856,50
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Jalan Propinsi	Rp	551.697.600,00
- Jalan Nasional	Rp	(308.927.600,00)
- Jalan Kabupaten	Rp	(198.977.000,00)
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA2021	Rp	610.051.910.313,00
Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan pada KIB:		
- Jalan Propinsi	Rp	20.425.567.951,87
- Jembatan pada Jalan Propinsi	Rp	11.091.790.663,11
- Jembatan pada Jalan Propinsi	Rp	(6.526.538.456,87)
- Jalan Lainnya	Rp	(13.942.822.495,00)
Penambahan aset dari Hibah Ruas Jalan Provinsi Dari Pem. Kab. Tana Toraja ke: (BAST No.268/IX/2020/Setda tgl.22 September 2020)		
- Jalan Provinsi	Rp	111.823.123.900,83
- Jembatan pada Jalan Propinsi	Rp	440.463.500,00
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(44.486.541.372,78)
Reklasifikasi Aset Jalan Propinsi dari KDP	Rp	238.658.591.515,90
Reklasifikasi Aset ke KDP	Rp	(27.414.150.141,00)
Utang Modal Tahun 2021	Rp	102.738.029.397,45
Penambahan Aset Tetap atas Beban dibayar di Muka TA. 2020 berdasarkan Kemajuan Fisik Pekerjaan pada TA. 2021	Rp	12.644.579.711,31
Pengurangan Aset Tetap atas Beban dibayar di Muka TA. 2021 berdasarkan Kemajuan Fisik Pekerjaan pada TA. 2021	Rp	(7.041.320.945,78)
Koreksi Aset akibat Selisih Pajak Pembayaran Kontrak Preservasi Peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kab.Sinjai (Utang 2020)	Rp	276.000,00
Koreksi Aset - Berkurang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Utang Modal TA. 2020 sesuai Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021	Rp	(1.470.000,00)
Kapitalisasi Aset - Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl. 23 Maret 2022 dari Beban Jasa Konsultansi ke:		
- Aset Jalan Provinsi	Rp	3.821.772.600,00
- Aset Jembatan Pada Jalan Provinsi	Rp	1.512.457.700,00
Reklasifikasi Aset - Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) atas Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan PHO/BAST sesuai Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021	Rp	65.543.845.282,79
Penambahan Aset - dari Beban dibayar di muka ke Aset Tetap sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA.2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl. 23-03-2022	Rp	4.783.543.842,44
Jumlah	Rp	7.777.607.542.823,77

Rincian Aset Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada Laporan Aset.

2. Bangunan Air

31/12/2021	31/12/2020
686.060.733.431,44	554.833.767.602,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	554.833.767.602,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:		
- Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp	1.535.000,00
- Bangunan Pembawa Irigasi	Rp	280.906.658.046,00
- Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Rp	14.589.331.000,00
- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/ Pantai	Rp	13.665.050.000,00
- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Rp	374.990.000,00
- Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp	(76.269.243.101,00)
- Bangunan Pelengkap Irigasi	Rp	(198.646.022.145,00)
- Bangunan Pengaman Pasang Surut	Rp	(13.620.500.000,00)
- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Rp	(4.718.136.000,00)
- Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Rp	(44.550.000,00)
- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Rp	(16.588.412.800,00)
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air T.A.2021	Rp	80.276.182.036,00
Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan pada KIB:		
- Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp	52.294.235.434,09
- Bangunan Pembawa Irigasi	Rp	25.680.658.587,43
- Bangunan Air Irigasi Lainnya	Rp	(77.974.894.021,52)
Kapitalisasi Aset karena perbedaan penganggaran aset tetap bangunan pembawa irigasi berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester II TA. 2021	Rp	4.766.160.434,00
Reklasifikasi Aset Bangunan Pengambilan Irigasi dari KDP	Rp	380.000.000,00
Reklasifikasi Aset Bangunan Pembawa Irigasi dari KDP	Rp	41.339.564.653,07
Reklasifikasi Aset Bangunan Waduk Pengembangan rawa dari KDP	Rp	99.283.800,00
Reklasifikasi Aset Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai dari KDP	Rp	1.862.435.005,74
Reklasifikasi Aset ke KDP	Rp	(19.986.736,00)
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(6.075.959.992,79)
Reklasifikasi Aset atas Utang Modal Jalan, Jaringan, Irigasi TA. 2020 dari Belanja Modal ke Beban Hibah berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester II TA. 2021	Rp	(991.488.455,69)
Utang Modal Tahun 2021	Rp	1.669.451.332,00
Penambahan Aset Tetap atas Beban dibayar di Muka TA. 2020 berdasarkan Kemajuan Fisik Pekerjaan pada TA. 2021	Rp	2.321.108.845,71
Koreksi Aset - Berkurang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Utang Modal TA. 2020 sesuai Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021	Rp	(25.000,00)
Kapitalisasi Aset - Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl. 23 Maret 2022 dari Beban Jasa Konsultansi ke Aset :		
- Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp	2.042.092.600,00
- Bangunan Pembawa Irigasi	Rp	1.573.518.133,00

Koreksi Aset - Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl.23-03-2022 dari Beban Jasa Konsultansi ke Aset:		
- Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp	734.921.715,00
- Bangunan Pembawa Irigasi	Rp	1.529.613.443,00
- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Rp	35.563.571,00
Penambahan Aset - dari Beban dibayar di muka ke Aset Tetap sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA.2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl. 23-03-2022		
	Rp	33.830.445,40
Jumlah	Rp	686.060.733.431,44
Rincian Aset Jalan, Jaringan, Irigasi dapat dilihat pada Laporan Aset.		

3. Instalasi

31/12/2021	31/12/2020
1.537.678.000,00	1.537.678.000,00
Saldo Awal 1 Januari 2021	
	Rp 1.537.678.000,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:	
- Instalasi Pertahanan Di Darat	Rp 13.255.000,00
- Instalasi Air Permukaan	Rp (9.880.000,00)
- Instalasi Gardu Listrik Induk	Rp (3.375.000,00)
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air T.A.2021	Rp 0,00
Jumlah	Rp 1.537.678.000,00
Rincian Aset Instalasi dapat dilihat pada Laporan Aset.	

4. Jaringan

31/12/2021	31/12/2020
1.110.564.000,00	761.264.000,00
Saldo Awal 1 Januari 2021	
	Rp 761.264.000,00
Reklasifikasi aset berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 tahun 2016:	
- Jaringan Telepon di Atas Tanah	Rp 1.535.000,00
- Jaringan dengan Media Udara	Rp 349.300.000,00
- Jaringan Pembawa	Rp (1.535.000,00)
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air T.A.2021	Rp 0,00
Jumlah	Rp 1.110.564.000,00
Rincian Aset Jaringan dapat dilihat pada Laporan Aset	

3.1.5.2.5. Aset Tetap Lainnya

31/12/2021	31/12/2020
3.074.933.499,72	1.153.906.500,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.967.514.488,72** dengan rincian pada tabel berikut:

1. Bahan Perpustakaan

31/12/2021	31/12/2020
184.083.000,00	184.083.000,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	184.083.000,00
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air T.A.2021	Rp	0,00
Jumlah	Rp	184.083.000,00
Tidak ada mutasi Aset Bahan Perpustakaan selama tahun 2021.		

2. Aset Tetap Dalam Renovasi

31/12/2021	31/12/2020
2.890.850.499,72	969.823.500,00

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	969.823.500,00
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2021	Rp	0,00
Kapitalisasi Aset karena perbedaan penganggaran aset tetap bangunan gedung berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester II TA. 2021	Rp	14.658.525,00
Reklasifikasi Aset Berdasarkan Pencatatan di KIB	Rp	107.419.011,00
Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi dari KDP	Rp	1.813.607.988,72
Pembayaran Utang Tahun 2020	Rp	(14.658.525,00)
Jumlah	Rp	2.890.850.499,72
Rincian Aset Tetap dalam Renovasi dapat dilihat pada Laporan Aset.		

3.1.5.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31/12/2021	31/12/2020
50.509.466.257,78	550.982.407.646,08

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
Per 31 Desember 2021 saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp50.509.466.257,78** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	550.982.407.646,08
Pengurangan Aset Atas Beban Dibayar di Muka TA.2021	Rp	(1.178.279.713,48)
Reklasifikasi Aset dari KDP ke Bangunan Gedung	Rp	(169.583.546.518,15)
Reklasifikasi Aset dari KDP ke Jalan, Jaringan, Irigasi	Rp	(293.431.665.637,82)
Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi dari KDP	Rp	(13.939.755.051,06)
Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke KDP	Rp	277.436.632,00
Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung ke KDP	Rp	2.874.696.962,00
Reklasifikasi Aset Jalan, Jaringan Irigasi ke KDP	Rp	27.434.136.877,00
Kapitalisasi Aset - Berdasarkan Reviu Inspektoratatas LKPD TA. 2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl.23-03-2022 dari Beban Jasa Konsultansi ke Aset Tetap	Rp	1.205.582.100,00
Kapitalisasi Aset dari Jasa Konsultansi ke KDP disebabkan belum selesai100% atas fisik dan pekerjaan Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021	Rp	347.782.878,00

Koreksi Aset - atas Bangunan Gedung Rest Area yang sebelumnya dibebankan pada Belanja Hibah dan aset tanah sebelumnya telah dihibahkan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten ke PemProv Sul Sel	Rp	9.307.584.766,00
Penambahan Aset - dari Beban dibayar di muka ke Aset Tetap sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan Berdasarkan Reviu Inspektorat atas LKPD TA.2021 No. 700.04/1327/A.1/ltprov tgl. 23-03-2022	Rp	1.756.930.600,00
Reklasifikasi Aset ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Pencatatan pada KIB atas Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan PHO/BAST sesuai Reviu Inspektorat atas LKPD TA. 2021	Rp	(65.543.845.282,79)
Jumlah	Rp	50.509.466.257,78
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran		

3.1.5.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31/12/2021	31/12/2020
6.215.382.024.022,19	5.781.900.507.700,68

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai Aset tetap berdasarkan Pemetaan Permendagri No.108 dan Pergub. Sulsel No.46 Thn 2021 tgl.6 Desember 2021.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp6.213.875.163.564,55** terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

31/12/2021	31/12/2020
(84.938.773.208,11)	(74.135.200.669,30)

Nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	(74.135.200.669,30)
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin T.A. 2021	Rp	(11.189.893.241,10)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Disebabkan oleh Penyesuaian Pemetaan Permendagri Nomor 108 Thn 2016 dan Pergub Sulsel No. 46 Tahun 2021 tgl. 06 Desember 2021:

- Alat angkutan	Rp	(6.448.409.859,26)
- Komputer	Rp	(5.486.199.212,65)
- Alat Keselamatan Kerja	Rp	(1.188.000,00)
- Alat Besar	Rp	4.431.314.040,64
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	1.218.418.957,13
- Alat Pertanian	Rp	8.149.583,33
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	5.621.305.285,56
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	295.024.658,06
- Alat Laboratorium	Rp	271.185.538,38
- Alat Persenjataan	Rp	90.634.711,10

Akumulasi penyusutan berkurang akibat adanya Mutasi Alat Angkutan ke BPSDM	Rp	171.200.000,00
--	----	----------------

Akumulasi penyusutan berkurang akibat Penghapusan Aset berdasarkan SK.Gubernur Sulsel No. 1189/V/Tahun 2021 Tgl. 5 Mei 2021	Rp	214.885.000,00
---	----	----------------

Jumlah	Rp	(84.938.773.208,11)
---------------	-----------	----------------------------

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31/12/2021	31/12/2020
(55.100.870.617,91)	(51.435.090.597,96)

Nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp (51.435.090.597,96)

Beban Penyusutan gedung dan bangunan TA. 2021 Rp (3.654.063.797,10)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Disebabkan oleh Penyesuaian Pemetaan Permendagri Nomor 108 Thn 2016 dan Pergub Sulsel No. 46 Thn 2021 tgl. 06 Desember 2021:

- Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp (1.867.879.318,66)

- Bangunan Gedung Rp 1.901.210.134,05

Koreksi Aset - atas Bangunan Gedung Rest Area yang sebelumnya dibebankan pada Belanja Hibah dan aset tanah sebelumnya telah dihibahkan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten ke Pem Prov Sul Sel Rp (45.047.038,24)

Jumlah Rp (55.100.870.617,91)

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31/12/2021	31/12/2020
(6.075.262.337.404,51)	(5.656.330.216.433,42)

Nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp (5.656.330.216.433,42)

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi TA. 2021 Rp (-319.377.266.844,09)

Akumulasi penyusutan bertambah karena Hibah Aset dari Kab. Tana Toraja (Ruas Jalan Provinsi) Berdasarkan BAST No. 268/IX/2020/Setda tgl.22 September 2020 Rp (99.572.465.986,65)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Disebabkan oleh Penyesuaian Pemetaan Permendagri Nomor 108 Thn 2016 dan Pergub Sulsel No. 46 Thn 2021 tgl. 06 Desember 2021:

- Jaringan Rp (105.517.708,00)

- Jalan Provinsi Rp 17.611.859,54

- Bangunan Waduk Rp 105.517.708,19

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disebabkan Penyesuaian Pemetaan Permendagri No.108 Thn 2016 Berdasarkan Pergub Sulsel No.46 Thn 2021 tgl.06-12-2021 Rp (0,08)

Jumlah Rp (6.075.262.337.404,51)

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

31/12/2021	31/12/2020
(80.042.791,66)	0,00

Nilai akumulasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 0,00

Beban Penyusutan aset tetap lainnya TA. 2021 Rp (80.042.791,66)

Jumlah Rp (80.042.791,66)

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Aset.

3.1.5.3. Aset Lainnya

31/12/2021	31/12/2020
116.957.549.367,00	116.957.549.367,00

Aset Lainnya merupakan nilai Aset lainnya per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

1. Aset Tak Berwujud

31/12/2021	31/12/2020
985.260.000,00	985.260.000,00

Saldo Rekening Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021 dapat ditampilkan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	985.260.000,00
Realisasi Belanja Modal T.A.2021	Rp	0,00
Jumlah	Rp	985.260.000,00

Rekening Aset Tak Berwujud sebesar **Rp985.260.000,00** terdiri atas Pembelian Software Program Keuangan (Tahun 2015), Software Program Asli Windows dan Microsoft Office (Tahun 2019).

Tidak ada mutasi rekening Aset Tak Berwujud selama tahun 2021.

2. Aset Lain – Lain

31/12/2021	31/12/2020
123.713.773.134,00	123.713.773.134,00

Rekening Aset Lain-lain merupakan rekening penampungan atas barang inventaris yang tidak dapat diakui sebagai Aktiva Tetap.

Saldo Awal Rekening Aset Lain-lain per 01 Januari 2021 sebesar **Rp123.713.773.134,00** terdiri dari :

- Kendaraan dinas yang pengadaannya ditujukan sebagai kendaraan operasional untuk Proyek Pekerjaan D.I. Bili-Bili pada tahun 2010 senilai **Rp243.147.700,00** (*Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit BPK Tahun 2016 Pada Dinas SDA, CK-TR*).
- Tanah dan Bangunan dalam status Pinjam Pakai oleh Beberapa Kabupaten/Kota dengan Total Nilai Perolehan sebesar **Rp1.584.275.000**.
- Aset tetap Bangunan air irigasi yang tidak digunakan dan akan diserahkan ke Kab/Kota (*Review Inspektorat Tahun 2019 Pada Dinas SDA-CK-TR*) senilai **Rp69.363.188.800,00**.
- Persediaan Hibah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2017 yang dipindahkan ke Aset Lainnya pada tahun 2018 senilai **Rp52.523.161.634,00**., dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Proyek	Nama Kegiatan / Belanja Modal	Volume	Nilai (Rp)
2013	Jalan Lingkar Kelurahan Kassi-Kasi Kec. Rappocini Kota Makassar	1 Paket	448.532.353,00
2013	Jalan Ruas Appajengnge Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng	1 Paket	746.570.000,00
2013	Jalan Strategis Lingkar Kab. Sidrap (2,0 Km)	1 Paket	17.013.558.474,00
2013	Ruas Jembatan Sungai Cenranae Kab. Bone	1 Paket	10.468.946.800,00

Tahun Proyek	Nama Kegiatan / Belanja Modal	Volume	Nilai (Rp)
2013	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Dr. Leimena	1 Paket	558.915.798,00
2013	Pembangunan Jalan Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar	1 Paket	764.116.106,00
2013	Pembangunan Jalan Strategis Tanabay – Bandara Aroepala Kab. Selayar	1 Paket	1.742.356.763,00
2013	Pembangunan Jalan Kabupaten Bone (1,0 Km)	1 Paket	1.781.846.202,00
2013	Pembangunan Jalan Beton Kab. Maros	1 Paket	492.071.648,00
2013	Pembangunan Jembatan S. Kalempang Kab. Sidrap	1 Paket	700.082.176,00
2013	Pembangunan Jembatan S. Cenranae	1 Paket	292.455.000,00
2014	Pembangunan Jalan Strategis Lingkar Kab. Sidrap (2,00 Km)	1 Paket	2.885.340.326,00
2014	Ruas Jembatan Sungai Cenranae Kab. Bone	1 Paket	887.423.990,00
2014	Pembangunan Strategis Jalan Lingkar Sidrap	1 Paket	13.740.945.998,00
	Jumlah		52.523.161.364,00

Per 31 Desember 2021 Tidak ada mutasi pada Rekening Aset Lain-Lain.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31/12/2021	31/12/2020
7.741.483.767,00	7.741.483.767,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp7.741.483.767,00**, tidak bertambah ataupun berkurang sejak tahun lalu.

3.1.6. Kewajiban

31 Desember 2021	31 Desember 2020
116.953.914.938,28	127.035.318.791,81

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah terdiri dari:

3.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

31 Desember 2021	31 Desember 2020
116.953.914.938,28	127.035.318.791,81

Utang beban Tahun 2020 sebesar **Rp127.035.318.791,81** merupakan nilai utang beban atas Belanja GU/TU maupun Belanja Modal selama tahun 2020. Utang Beban tahun 2020 sebagian besar telah diselesaikan, dan tersisa sebesar **Rp3.211.658.059,35** dengan perincian sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
0,00	2.374.671.776,00

Saldo Awal	Rp	2.374.671.776,00
Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2020	Rp	<u>(2.374.671.776,00)</u>
Jumlah	Rp	0,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
60.644.810,00	33.156.402.321,30

Saldo Awal	Rp	33.156.402.321,30
Pelunasan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020	Rp	(31.343.954.737,69)
Penyesuaian Utang Atas Perubahan Nomenklatur	Rp	(1.712.709.123,61)
Penyesuaian utang berdasarkan hasil reviu Inspektorat atas LKPD Prov. SULSEL TA. 2021	Rp	<u>(39.093.650,00)</u>
Jumlah	Rp	60.644.810,00

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 yang belum selesai dapat dilihat di lampiran.

3. Utang Belanja Pemeliharaan (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
327.701.503,00	17.458.962.159,80

Saldo Awal	Rp	17.458.962.159,00
Pelunasan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2020	Rp	(17.102.084.666,80)
Penyesuaian utang berdasarkan hasil reviu Inspektorat atas LKPD Prov. SULSEL TA. 2021	Rp	<u>(29.175.990,00)</u>
Jumlah	Rp	327.701.503,00

Rincian Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 yang belum selesai dapat dilihat di lampiran.

4. Utang Belanja Perjalanan Dinas (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
0,00	256.842.096,00

Saldo Awal	Rp	256.842.096,00
Koreksi Utang sesuai Hasil Sesuai Hasil Reviu Inspektorat Cfm.Surat Klarifikasi Utang Tim BPK No.36/TimTerinci LKPD-Prov/04/2021 Tgl. 30 April 2021	Rp	(29.717.159,00)
Pelunasan Utang Perjalanan Dinas Tahun 2020	Rp	(174.411.937,00)
Penyesuaian utang berdasarkan hasil reviu Inspektorat atas LKPD Prov. SULSEL TA. 2021	Rp	<u>(52.713.000,00)</u>
Jumlah	Rp	0,00

5. Utang Modal Peralatan dan Mesin (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
0,00	951.314.900,00

Saldo Awal	Rp	951.314.900,00
Pelunasan Utang Perjalanan Dinas Tahun 2020	Rp	<u>(951.314.900,00)</u>
Jumlah	Rp	0,00

6. Utang Modal Gedung dan Bangunan (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
677.758.000,15	4.166.226.727,78

Saldo Awal	Rp	4.166.226.727,78
Reklass Pekerjaan Pembangunan Pelataran Kawasan COI dari Utang Modal Jalan	Rp	16.326.052.699,16
Reklass Pekerjaan Renovasi Gedung Penyimpanan Alat UPR ke Utang Modal Jalan	Rp	(364.428.000,00)
Pelunasan Utang Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020	Rp	(19.450.093.417,19)
Koreksi Utang disebabkan oleh perbedaan Pecahan desimal pada penetapan utang 2020	Rp	<u>(9,60)</u>
Jumlah	Rp	677.758.000,15

Rincian Utang Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 yang belum selesai dapat dilihat di lampiran.

7. Utang Modal Jalan, Jaringan, Irigasi (Saldo Awal)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
2.145.578.746,20	68.670.898.810,93

Saldo Awal	Rp	68.670.898.810,93
Reklass Pekerjaan Pembangunan Pelataran Kawasan COI dari Utang Modal Gedung dan Bangunan	Rp	(16.326.052.699,16)
Reklass Pekerjaan Renovasi Gedung Penyimpanan Alat UPR ke Utang Modal Gedung dan Bangunan	Rp	364.428.000,00
Reklass Utang 2020 (Selisih Pajak Pembayaran Kontrak Preservasi Peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kab. Sinjai	Rp	276.000,00
Pelunasan Utang Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2020	Rp	(50.562.501.365,57)
Penyesuaian utang berdasarkan hasil reviu Inspektorat atas LKPD Prov. SULSEL TA. 2021	Rp	<u>(1.470.000,00)</u>
Jumlah	Rp	2.145.578.746,20

Rincian Utang Modal Jalan, Jaringan, Irigasi Tahun 2020 yang belum selesai dapat dilihat di lampiran.

Tahun 2021 utang beban yang timbul sebesar **Rp113.742.256.878,93** dengan perincian:

No.	Jenis Utang	Nilai
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	1.613.700.093,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.771.754.776,61
3	Utang Modal Bangunan Gedung	4.949.321.279,87
4	Utang Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	104.407.480.729,45
	Jumlah	113.742.256.878,93

3.1.7. Ekuitas

31 Desember 2021	31 Desember 2020
3.588.132.097.457,78	4.021.139.333.306,53

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas - LPE

Ekuitas merupakan nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2021	3.299.589.814.810,33
Surplus / Defisit-LO T.A. 2021	(435.692.311.105,84)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar:

- Rekening Konsolidasi	721.549.518.496,20	
- Koreksi Aset Tetap	2.528.244.119,00	
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	6.131.339,09	
- Koreksi Hutang	<u>150.699.799,00</u>	
		<u>724.234.593.753,29</u>
Jumlah Ekuitas – LPE		3.588.132.097.457,78

R/K PPKD

Saldo Awal 1 Januari 2021	721.549.518.496,20
---------------------------	--------------------

Penerimaan R/K PPKD:

- SP2D LS	1.010.741.556.590,00
- SP2D UP/GU/TU	35.648.303.455,00
- Pengembalian Dana dari Kasda atas Kesalahan pembukuan tgl.22-03-2021 (STS 4801 dan STS 4802)	3.057.000,00
- Penyetoran Sisa Kas sesuai LHP Inspektorat No.700.04/1011/B.I/ITPROV No.003/XI/ SKTJM/Th.2021 Tanggal 4 November 2021	<u>301.158.000,00</u>

Jumlah Penerimaan R/K PPKD	1.046.694.075.045,00
----------------------------	----------------------

Pengeluaran R/K PPKD:

- Rekening Konsolidasi	(721.549.518.496,20)
- Setoran Pendapatan SKPD	(2.290.619.800,00)
- Pengembalian Sisa Kas GU/TU	(1.074.017.667,00)
- Pengembalian lebih bayar (sisa kas 2020)	(297.616.875,00)
- Pengembalian lebih bayar SPJ 2021	(83.755.249,00)
- Penyetoran Piutang TGR	<u>(30.000.000,00)</u>

Jumlah Pengeluaran R/K PPKD	<u>(725.325.528.087,20)</u>
-----------------------------	-----------------------------

Jumlah R/K PPKD	1.042.918.065.454,00
-----------------	----------------------

Jumlah Ekuitas	<u>3.588.132.097.457,78</u>
----------------	------------------------------------

Jumlah Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2021	4.631.050.162.911,78
---	-----------------------------

3.2. Pengungkapan Atas Pos Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

3.2.1. Beban dibayar di muka

Biaya – biaya yang belum merupakan kewajiban Dinas untuk melakukan pembayaran pada periode berjalan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu terdiri atas:

- Pembayaran premi asuransi Bangunan Kantor dan Kendaraan Dinas Tahun 2021 sebesar **Rp309.000.000,00**
- Selisih lebih Realisasi Keuangan terhadap Realisasi Fisik Pekerjaan Tahun 2020 **Rp23.518.253.921,04**

Pengeluaran dibayar di muka tersebut akan diakui sebagai beban berdasarkan waktu dan jumlah yang terpakai/sesuai progress fisik yang telah terpenuhi, sehingga saldo akhir beban dibayar di muka per 31 Desember 2021 menjadi **Rp8.911.794.481,91**

3.2.2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Potensi Penerimaan PAD dari hasil penyewaan rumah dinas milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul Sel Tahun 2021 sesuai dengan nilai penetapan sebesar **Rp68.970.000,00** namun hanya tertagih sebesar **Rp46.130.000,00**, sehingga selisih sebesar **Rp22.840.000,00** dicatat sebagai piutang retribusi yang akan ditagihkan pada tahun 2022.

3.2.3. Utang Beban

Biaya-biaya yang sudah terjadi namun sampai dengan akhir periode TA. 2021 belum dibayarkan adalah sebagai berikut :

- **Utang Beban Gaji dan Tunjangan**
Utang Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2021 adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2021 sebesar **Rp1.613.700.093,00**
- **Utang Beban Barang dan Jasa**
Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2021 terdiri dari:

Jenis Belanja	Uraian	Nominal
Beban Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Dinas dan UPT Desember 2021	18.025.885,00
Beban Tagihan Air	Tagihan PDAM Dinas dan UPT Desember 2021	8.041.640,00
Beban Tagihan Listrik	Tagihan Listrik Dinas dan UPT Desember 2021	68.619.671,00
Belanja Internet	Tagihan Internet Kantor Dinas Desember 2021	5.220.247,00
Belanja Hibah	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	66.630.080,00
Belanja Hibah	Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lain	2.605.217.253,61
Jumlah		2.771.754.776,61

- **Utang Modal Gedung dan Bangunan**

Jenis Belanja	Uraian	Nominal
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Brigade Siaga Bencana Tahap II	432.607.013,00
	Review Desain Gedung Pusat Produk Unggulan Dalam Negeri Unggulan Daerah	19.902.000,00
	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kab. Selayar	36.960.000,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap III	570.107.547,02
	Supervisi Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap III	136.521.073,00
	Review DED Masjid 99 Kubah	40.387.934,00
Utang Belanja Modal Taman	Pembangunan Pelataran Kawasan Kuliner Center Point Of Indonesia (COI)	3.620.254.812,85
Utang Belanja Modal Bangunan GedungRumah Tidak Bersusun	Pembangunan Rumah Kayu Dan Rumah Sehat Di Daerah Gor Sudiang (Lokasi Edu Wisata Pemprov)	92.580.900,00
Jumlah		4.949.321.279,87

- **Utang Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Jenis Belanja	Uraian	Nominal
Utang Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	Pembangunan Bendung Lalengrie 1 Kab. Bone	211.595.000,00
Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	Peningkatan DI. Waru-Waru Kab. Bone	956.682.171,00
	Peningkatan DI. Bungadidi 1 Kab. Luwu Utara	425.817.000,00
	Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Daerah Irigasi Kalamisu Kab. Sinjai (Sumber Dana PEN)	55.370.425,00
	Penyusunan DED Kawasan Strategis Pucak	19.986.736,00
Utang Belanja Modal Jalan Provinsi	Penanganan Pasca Bencana Ruas Batas Gowa - Tondong	91.116.847,00
	Preservasi Jln Ruas Ujung Lamuru - Palattae - Bojo 1.	13.629.091.110,00
	Pemb. Jln Ruas Bua - Rantepao di Kab. Luwu = 10 Km	18.024.471.163,50
	Pe mb. Jln Ruas Latuppa - Bongko - Salulimbong - Pantilang 1	2.384.964.620,00
	Pemb. Jln Ruas Bua - Rantepao 1 di Kab. Luwu	10.362.342.442,00
	Pemb. Jln Ruas Sabbang - Tallang 1 di Kab. Luwu Utara	539.755.722,00
	Pemb. Jln Ruas Ussu – Nuha - Beteleme Bts. Prov. Sulteng 1 di kab. Luwu Timur	6.941.683.331,00
	Pemb. Jln Ruas Passobo - Matangli - Massupu 1 di Kab. Tana Toraja = 1,8 km	6.357.817.262,20
	Pemb. Jln Ruas Passobo - Matangli - Massupu 1 di Kab. Tana Toraja	10.400.745.887,00
	Pemb. Jln Ruas Rantepao - Pangngala - Bts. Prov. Sulbar 1	3.961.345.824,00
	Pemb. Jln. Ruas Sabbang - Tallang = 9,7 Km (DAK Penugasan)	13.780.534.087,86
	Pemb. Jalan Ruas Bua - Rantepao Kab. Toraja Utara / Luwu (DAK PENUGASAN)	48.227.265,80
	Proteksi Rumaja Ruas Jalan Palangga - Sapaya di Kab. Gowa	104.412.006,78
	Preservasi Jalan Ruas Boro - Jeneponto di Kab. Jeneponto	218.948.574,04
	Proteksi Rumaja Ruas Jalan Sungguminasa - Malino di Kab. Gowa	436.217.100,00
	Penanganan Jalan Kawasan Puca'	2.768.153.602,19
	Pengawasan Teknis Jalan di Kab. Gowa 1 Paket (pallangga-sapaya)	470.208.300,00
	Supervisi Rehabilitasi Jalan Provinsi di Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara (PHJD) (rantepao-pangalla-barupu)	935.127.400,00
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Pemb. Jbt. Malake Kab. Sidrap = 60 M	1.279.794.000,00
	Pemb. Jbt. S. Pacongkang di Kab. Soppeng = 130 m	245.900.305,58
	Pemb. Jbt. S. Lolisang di Kab. Bulukumba	1.362.502.672,00
	Pembangunan Jembatan S. Marandang di Kab. Tana Toraja	67.853.410,86
	Pembangunan Jembatan S. Pacongkang di Kab. Soppeng	1.706.508.555,26
	Pembangunan Jembatan S. Palattae di Kab. Bone	96.692.680,45
	Pemb. Jbt. Ruas Bua - Rantepao CS =110 m	6.523.615.227,93
	Jumlah	104.407.480.729,45

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Visi dan Misi Dinas

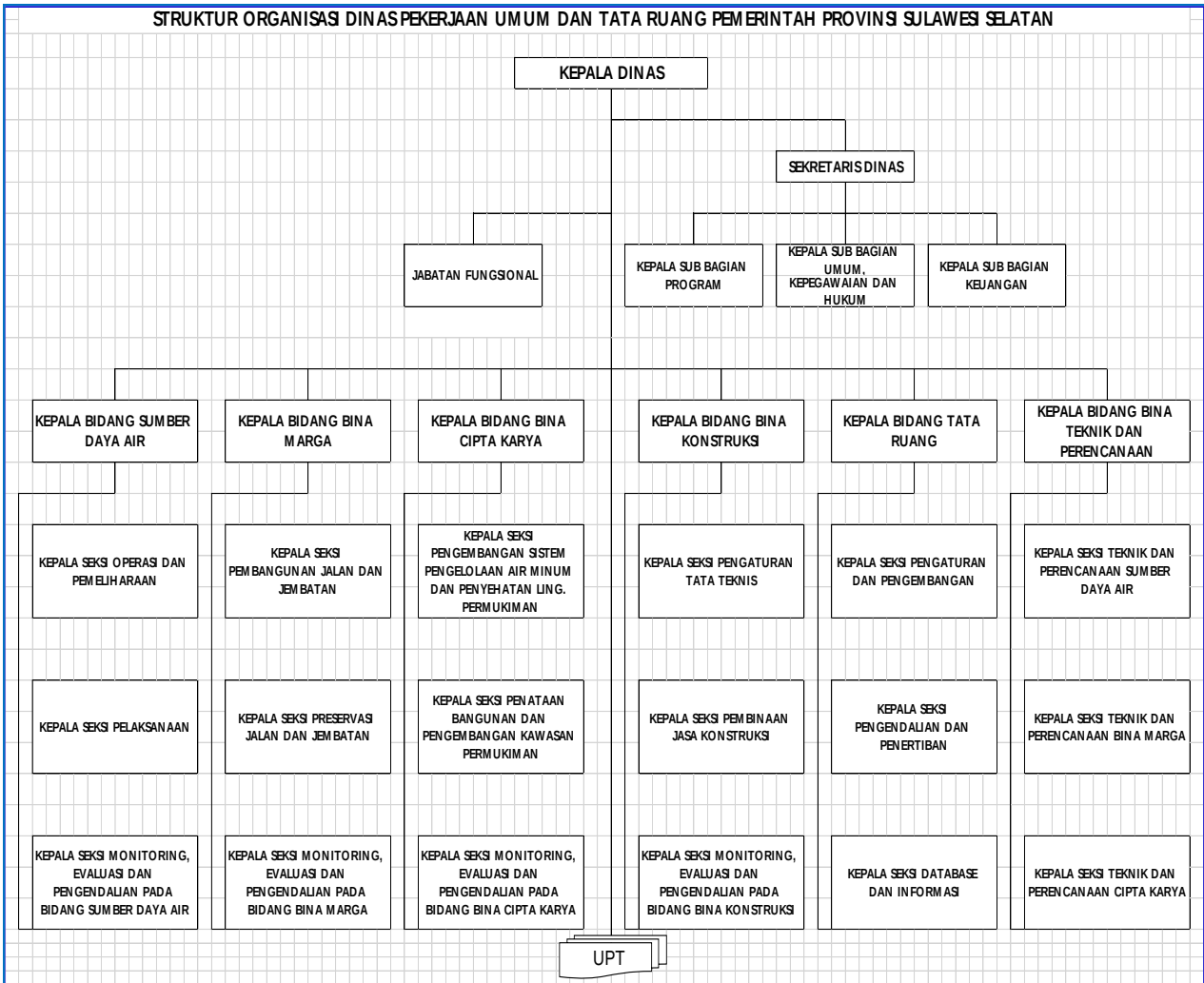
4.1.1. Visi

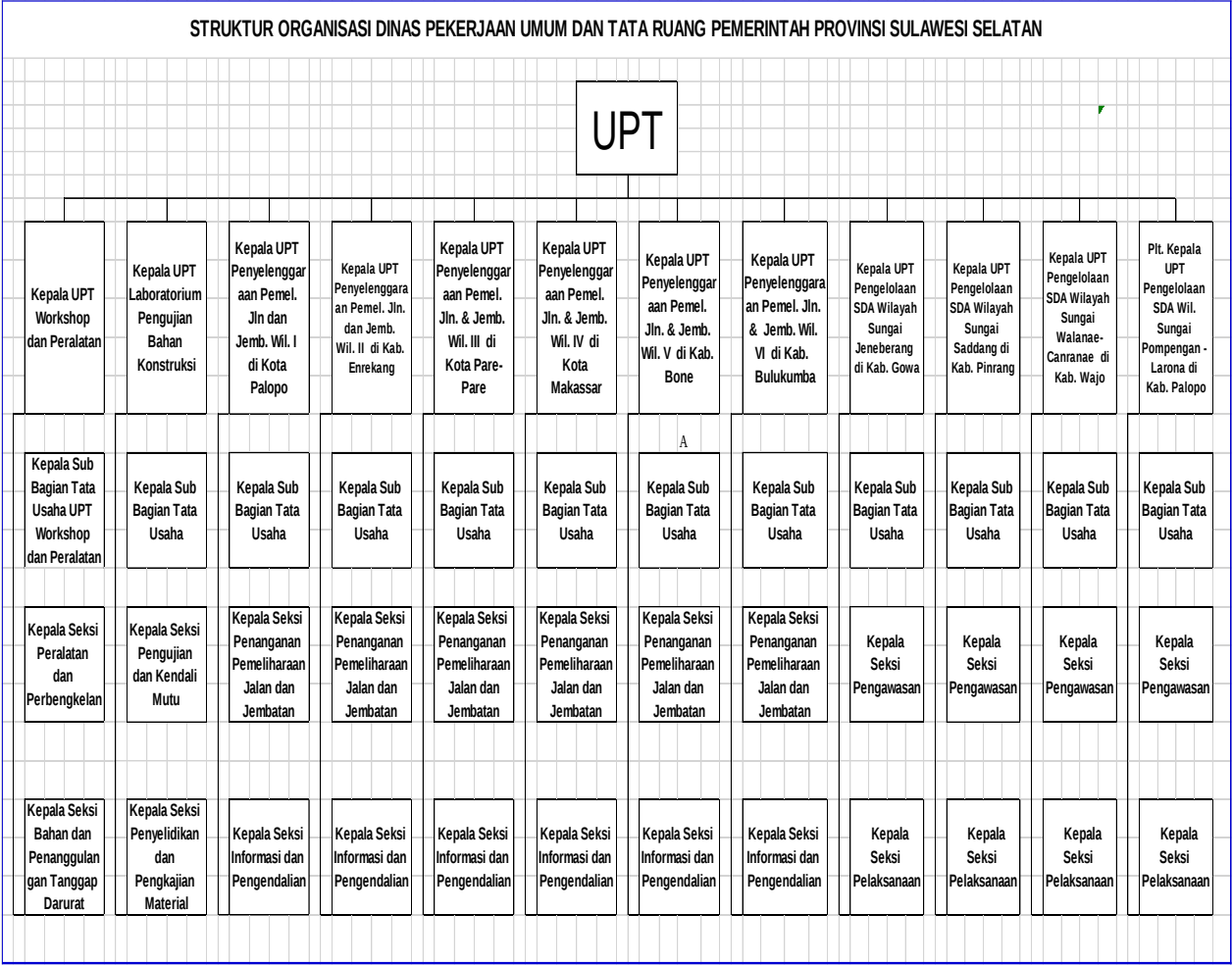
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengemban visi "mewujudkan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dan berkearifan lokal".

4.1.2. Misi

- 1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna.
- 2. Meningkatkan pembangunan terpadu untuk pelayanan yang berkesinambungan.
- 3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan air bersih dan sanitasi untuk penyehatan lingkungan pemukiman.
- 4. Mengembangkan kualitas manajemen kelembagaan berbasis e-government yang akuntabilitas dan sinergi dengan sektor lain dalam menghadapi pasar global.

4.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan





4.3. Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan struktur organisasi, berikut diuraikan tugas pokok dan fungsi:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas & fungsi.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Tugas Pokok:

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sumber daya air.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang sumber daya air;
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang sumber daya air;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok:

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina marga.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang bina marga;
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang bina marga;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Bina Cipta Karya

Tugas Pokok:

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Cipta Karya.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang bina cipta karya
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang bina cipta karya;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang bina cipta karya;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang bina cipta karya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Bina Konstruksi

Tugas Pokok:

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Konstruksi.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang bina konstruksi;
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang bina konstruksi;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang bina konstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang bina konstruksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

7. Bidang Tata Ruang

Tugas Pokok:

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang tata ruang

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang tata ruang;
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang tata ruang;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang tata ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

8. Bidang Bina Teknik dan Perencanaan

Tugas Pokok:

Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Bina Teknik dan Perencanaan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang bina teknik dan perencanaan;
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang bina teknik dan perencanaan;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang bina teknik dan perencanaan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang bina teknik dan perencanaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

9. Kepala UPT

Tugas Pokok:

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis adalah membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan wilayah kerjanya.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di Unit Pelaksana Teknis;
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di Unit Pelaksana Teknis;
- c. Pemantauan dan evaluasi di Unit Pelaksana Teknis;
- d. Pelaksanaan administrasi Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai Unit Pelaksana Teknis tugasnya.

4.4. Sumber Daya SKPD

- Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun telah menunjukkan keseimbangan yang cukup memadai terhadap pendidikan formal, namun dapat dikatakan bahwa kualitas SDM yang baik berkaitan dengan kepemimpinan dan keterampilan masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka menyesuaikan tuntutan perkembangan dan pelayanan kepada masyarakat.

No.	Struktural/Fungsional	JenisKelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	16	3	19
3.	Eselon IV	38	16	54
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	1	1	2
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	391	152	543
	Jumlah	447	172	619

Tabel Jumlah Eselon Berdasarkan Jabatannya

No.	Jenjang Pendidikan	JenisKelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1.	S3	1	1	2
2.	S2	55	36	91
3.	S1	93	71	164
4.	SLTA	287	59	346
5.	SLTP	16	-	16
	Jumlah	452	184	619

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		jumlah (Orang)
		Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1.	Gol. IV	37	12	49
2.	Gol. III	154	102	256
3.	Gol. II	245	53	298
4.	Gol. I	16	-	16
	Jumlah	452	167	619

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Staf Non ASN	Jumlah
1.	Staf Kantor Dinas dan Supir	76
2.	Cleaning Service	20
3.	Staf UPT Jalan Jembatan, UPT Workshop dan UPT Laboratorium	189
4.	Staf UPT Wilayah Sungai(Ws) / Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga Operasional Bendung (POB)	230
5.	Pencatat Curah Hujan (PCH)	162
	Jumlah	677

Tabel JumlahSTAF NON PNS berdasarkan Unit Kerjanya

- Aset yang Dikelola**
 Sarana dan prasarana penunjang yang telah dimiliki untuk mendukung sepenuhnya kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam menunjang pelayanan prima adalah:
 - Sarana kantor Unit Pelaksana Teknis (UPTD), sub-unit dan ranting bertempat pada beberapakabupaten/kotayaitudi:Kantor UPTD I di Kab. Luwu Utara dan Sub-unit di Luwu, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
 - Kantor UPTD II di Kab. Tana Toraja dan sub unit di Kab.Toraja Utara dan Kab. Enrekang.
 - Kantor UPTD III di Kota Pare-Pare: sub-unit di Kab.Pinrang, Sidrap, Barru, Pangkep.
 - Kantor UPTD IV di Kota Makassar dan sub-unit di KabupatenMaros, Gowa, Takalar.
 - Kantor UPTD V di Kabupaten Bone dan sub-unit di KabupatenSoppeng, Wajo.
 - Kantor UPTD VI di Kabupaten Bulukumba dan sub-unit di Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Selayar.
 - Kantor UPTD Wilayah Sungai Jeneberang di Kabupaten Gowa.
 - Kantor UPTD Wilayah Sungai Saddang di Kabupaten Pinrang.
 - Kantor UPTD Wilayah Sungai Walanae-Cenranae di Kabupaten Wajo.
 - Kantor UPTD Wilayah Sungai Pompengan-Larona di Kota Palopo
- Gedung laboratorium dengan peralatan unit pengujianaspal, tanah dan konstruksi di Baddoka Makassar, digunakan untukpengujian kegiatan jalan jembatan di lingkungan OPD

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pengujian oleh instansi lain.

2. Alat berat untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota dengan jumlah peralatan sebanyak 110 buah, dengan kondisi peralatan sebagai berikut :
- a. Kondisi baik : 49 buah
 - b. Kondisi rusak ringan : 24 buah
 - c. Kondisi rusak berat : 28 buah
 - d. Kondisi rusak sama sekali : 9 buah

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Aset Tanah	-	-	-	1.782 Ha
2	Aset Peralatan dan Mesin	-	-	-	2.753 Unit
3	Aset Gedung dan Bangunan	142 unit	296 unit	-	438 Unit
	Rumah Negara	-	-	-	-
4.	Aset Jalan, Jembatan, dan Irigasi				
	- Panjang Jalan	672,13 Km	883,52 Km	453,70 Km	2.009,35 Km
	- Jembatan				
5.	Aset Irigasi dan SDA				
	- Saluran Irigasi Permukaan				459.850 m
	- Saluran Irigasi Tambak				487.922 m
	- Bendung				57 Unit
	- Embung	-	-	-	1 unit
	- Pintu Air				513 Unit
	- Pos Curah Hujan				153 Unit

Tabel Jenis Aset dan Jumlah Aset

BAB V

PENUTUP

Catatan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terperinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

Makassar, Februari 2022
Plt. KEPALA DINAS

Ir. Hj. ASTINA ABBAS, MT.
Nip.19661001 199203 2 017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Saldo dan Neraca, Laporan Persediaan, Catatan atas Laporan Aset, dan Laporan Utang Beban TPP dan Belanja Barang dan Jasa Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran dan Posisi Keuangan secara Layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 31 Desember 2021

**Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ir. Hj. ASTINA ABBAS, MT
Nip.19661001 199203 2 017